



Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan

2.13.0.00.0.00.01.000

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel Tahun 2021-2026 mempunyai arti strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan DPMD Provinsi Kalsel, Isu – Isu Strategis, Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas PMD, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta Arah Kebijakan RPJMD dan Indikator Kinerja Dinas PMD Prov Kalsel.

Kami menyadari bahwa dalam upaya penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan system perencanaan kedepannya.

Atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam pembuatan Rencana Strategis Tahun 021-2026 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
Gambaran Pelayanan DPMD Provinsi Kalsel	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel	43
BAB III	
Isu – Isu Strategis	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel	50
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2016 – 2021	53
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD Provinsi	60
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	62
BAB IV	
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PMD	63
4.1. Tujuan dan Sasaran	63



BAB V		
Strategi dan Arah Kebijakan		68
BAB VI		
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif		73
BAB VII		
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel		94
BAB VIII		
Penutup		97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan baik yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Badan sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan seperti halnya setiap instansi pemerintah lainnya memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dijalankan lima tahun kedepan untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan menjadi titik fokus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mengakomodasi upaya-upaya terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. Pemilihan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang tepat menjadi kunci dalam pencapaian target instansi.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, serta adanya perubahan SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. SOTK baru Dinas PMD sebagai bagian dari penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Revisi Renstra Dinas PMD sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai



- Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;



16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkultur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 98);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026;
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi.

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.



- c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, kerangka pikir dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan peluang pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian dan Kab/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah dan menentukan isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan jangka menengah yang akan diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
- f. pembinaan, pengawasan dan peendalian unit pelaksana teknis daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;
- e. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
- f. membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis daerah;
- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



2.1.1.1 Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaa dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. mengendalikan pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
- menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menyiapkan bahan dan memproses dokumen perencanaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;



- menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominative dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.2 Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi dan kerja sama desa, pengelolaan keuangan dan aset desa serta penataan dan evaluasi perkembangan desa.



Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian administrasi pemerintahan desa;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerja sama pemerintahan desa;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan aset desa;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan desa; dan
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi perkembangan desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pemerintahan desa;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja sama pemerintahan desa;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset desa;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan desa;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi perkembangan desa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Penataan dan Administrasi Desa

Seksi Penataan dan Administrasi Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan pengembangan kerja sama pemerintahan desa. Seksi Penataan dan Administrasi Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan penataan desa;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemilihan kepala desa;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana administrasi pemerintahan desa;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan desa;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan desa;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembentukan badan permusyawaratan desa dan badan musyawarah desa;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dan badan musyawarah desa;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Keuangan dan Aset Desa

Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset desa. Seksi Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset desa;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan dan aset desa;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan serta penatausahaan keuangan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan aset desa;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penatausahaan keuangan desa;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyusunan laporan realisasi anggaran desa;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi inventarisasi dan identifikasi aset-aset desa;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan supervisi penatausahaan aset-aset desa;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan supervisi penyusunan laporan pertanggungjawabanpemanfaatan aset-aset desa;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dankriteria pengelolaan keuangan dan aset desa;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuankerja/unit kerja dan instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbinganeknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbinganeknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan asetdesa; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Kerja Sama dan Evaluasi Perkembangan Desa

Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan desa dan evaluasi perkembangan desa. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kerja sama, potensi, serta perkembangan desa;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi potensi desa;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kerja sama desa;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi perkembangan desa;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi serta supervisi inventarisasi dan identifikasi potensi desa;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyusunan profil dan pemetaan potensi desa;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan, pemanfaatan dan pemberdayaan potensi desa;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi terkait kerja sama desa;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi evaluasi perkembangan desa;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyusunan laporan perkembangan kerja sama desa;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan dan evaluasi perkembangan desa;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa dan status desa;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.3 Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kelembagaan masyarakat dan sosial dasar. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar; dan
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan aktualisasi budaya masyarakat.

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kelembagaan masyarakat dan sosial dasar;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan aktualisasi dan pengembangan budaya masyarakat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, mengolah, menganalisis dan menyajikan data lembaga kemasyarakatan;



- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kapasitas masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kapasitas masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan serta peningkatan pengetahuan masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan serta peningkatan keterampilan masyarakat;

- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan ekonomi keluarga;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan kewirausahaan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- q. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

3. Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar serta aktualisasi dan pemberdayaan nilai-nilai budaya masyarakat. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar serta pemberdayaan nilai-nilai budaya masyarakat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data layanan sosial dasar dan nilai-nilai budaya masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan nilai-nilai budaya masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi layanan sosial dasar masyarakat;



- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi nilai-nilai budaya masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan layanan pendidikan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan layanan kesejahteraan sosial masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aktualisasi nilai-nilai adat dan budaya masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat dan budaya masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dalam peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat; dan
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.4 Bidang Pengembangan Ekonomi Desa

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;



- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data lembaga ekonomi desa;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lembaga ekonomi desa;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;



- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data terkait usaha ekonomi masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta menyusun rencana pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- k. Menyusun laporan kinerja pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.5 Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan inovasi desa;



- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan.

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan perdesaan;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan inovasi desa;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan Inovasi Desa

Seksi Pengembangan Inovasi Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi dalam pengembangan inovasi desa. Seksi Pengembangan Inovasi Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa dalam pelaksanaan mitigasi bencana
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data inovasi desa
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya alam perdesaan
- f. Menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan bencana dan mitigasi bencana perdesaan
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, fasilitasi pengkajian dan penerapan serta pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan
- h. Melaksanakan pendampingan dalam pengembangan kelompok masyarakat, kelembagaan lokal desa berbasis IPTEKIN dalam mewujudkan difusi inovasi masyarakat perdesaan
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam pelaksanaan mitigasi bencana



- k. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan inovasi desa dalam pelaksanaan mitigasi bencana
 - n. Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan
 - o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dalam pengembangan inovasi desa
 - p. Menyiapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan inovasi desa
 - q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa
 - r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan inovasi desa
 - s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
- Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pembangunan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perdesaan. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan sarana prasarana pada kawasan perdesaan
 - b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan sanitasi pada kawasan perdesaan
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sanitasi pada kawasan perdesaan
 - d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana kawasan perdesaan
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sanitasi pada kawasan perdesaan
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana pada kawasan perdesaan

- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sanitasi pada kawasan perdesaan
- i. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta menyusun rencana pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perdesaan
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana pada kawasan perdesaan
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sanitasi pada kawasan perdesaan
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi sanitasi pada kawasan perdesaan
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan sarana dan prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewewenangannya

2.1.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah

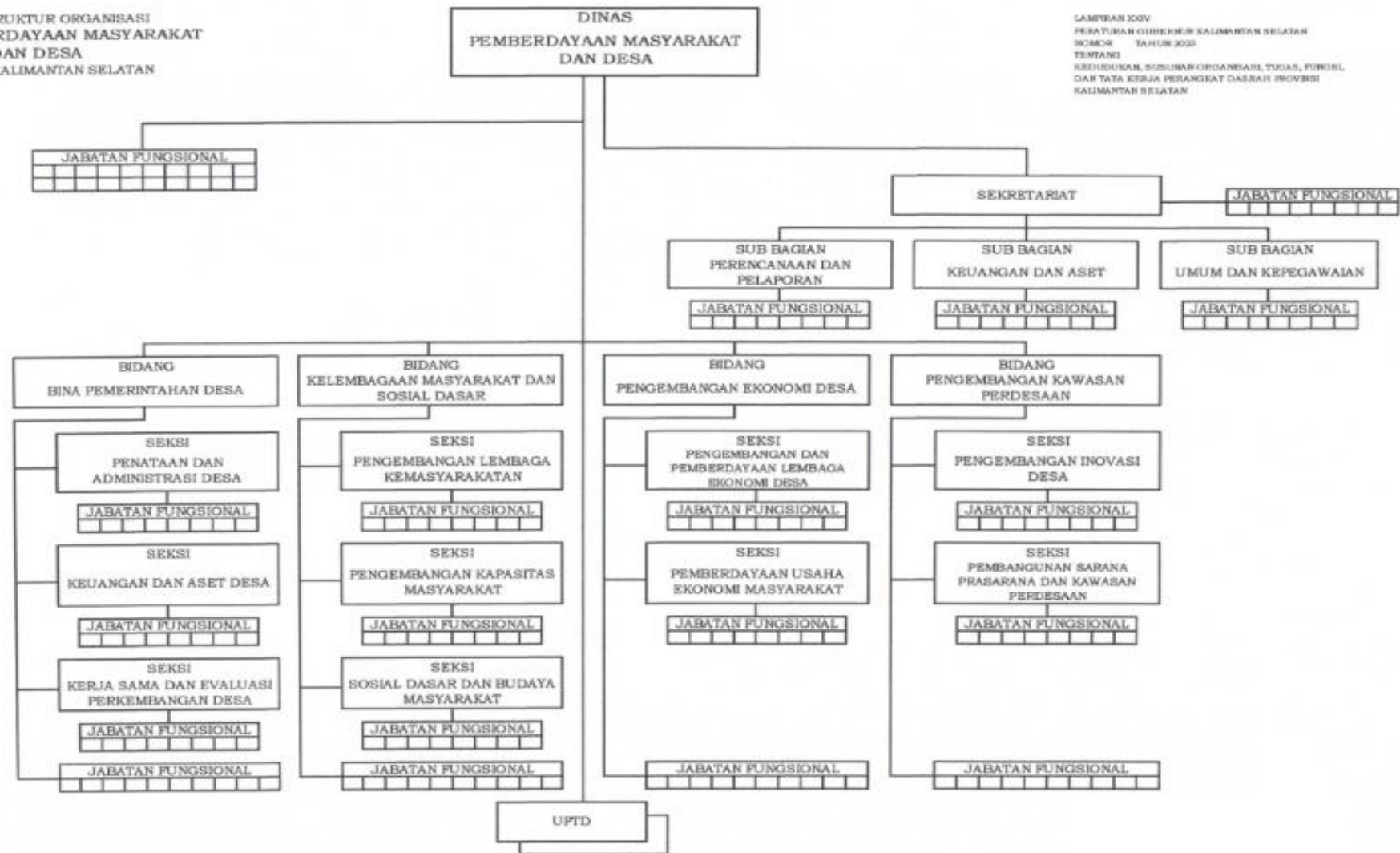
Pembentukan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN 200V
PERATURAN GOVERNOR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TANGGAL 2023
TENTANG
KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh:

2.2.1 Sumber daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 47 orang dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenis kelamin:

- Laki-Laki : 15 orang
- Perempuan : 17 orang

Jumlah pegawai kontrak Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- Laki-Laki : 33 orang
- Perempuan : 14 orang

Jumlah PNS dengan formasi eselon sebagai berikut :

- Eselon II.a : 1 orang
- Eselon III.a : 5 orang
- Eselon IV.a : 13 orang
- Jabatan Fungsional : 4 orang
- Non Eselon : 9 orang

Jumlah PNS DPMD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S2) : 16 orang
- Sarjana (S1) : 6 orang
- D4 : 3 orang
- Sarjana Muda (D3) : 2 orang
- D. II : 1 orang
- SLTA : 4 orang

Jumlah PNS Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat penjurangan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :



a. Struktural

- Diklat Pim II : 1 orang
- Diklat Pim III : 4 orang
- Diklat Pim IV : 8 orang
- Non Diklat : 15 orang

b. Fungsional

- Diklat Pranata Komputer : 2 orang
- Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil : 2 orang

Secara rinci jumlah pegawai pada DPMD Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari eselonering dan kepangkatan / golongan adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan eselonering :

- Kepala Badan (eselon II.a) : 1 orang
- Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang
- Kepala Bidang (eselon III.a) : 4 orang
- Kepala Sub Bagian / Sub Bidang : 13 orang
- Jabatan Fungsional Arsiparis : 2 orang
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer : 2 orang
- Unsur Staf : 9 orang

2. berdasarkan kepangkatan

- Golongan IV/d : 0 orang
- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 5 orang
- Golongan IV/a : 7 orang

- Golongan III/d : 10 orang
- Golongan III/c : 4 orang
- Golongan III/b : 2 orang
- Golongan III/a : 0 orang

- Golongan II/d : 3 orang
- Golongan II/c : 0 orang
- Golongan II/b : 0 orang
- Golongan II/a : 0 orang
- Golongan I/c : 0 orang

2.2.2 Aset Yang Dikelola

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Provinsi Kalsel.

- 2) Ruang kerja

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

- 3) Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.

- 4) Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.3.1 Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan *stakeholders* terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai



kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

- b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kalimantan Selatan.

2.3.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

No	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Lingkungan DPMD Prov Kalsel dan seluruh SKPD yang menjadi bagian perencanaan dilingkungan DPMD Kab/Kota
2	Bidang Bina	Aparatur desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan



No	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
	Pemerintahan Desa	Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten / Kota
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa, Pokjanal Posyandu, Operator Sistem Informasi Posyandu, PKK, Lembaga Adat/Budaya/Kelompok Seni Desa, Pelaku Unit Layanan Sosial Dasar Skala Lokal Desa, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tenaga Pendamping Desa, Dinas PMD Kabupaten
4	Bidang Pengembangan Ekonomi Desa	Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa, pelaku usaha di desa
5	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan	Posyantek, masyarakat penggiat Teknologi Tepat Guna, Kodim, KP-SPAMS, BUMDesma

2.3.3 Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

NO	URAIAN TUGAS	OBJEK KINERJA PELAYANAN
1	SEKRETARIAT	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJM, RENSTRA, RENJA, RKA
	menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	LAKIP, LPPD, LKPJ, RFK,
	menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;	DPA, LRA
	mengendalikan pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	RKBU, RTBU, Daftar Inventaris Barang
	Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina	

NO	URAIAN TUGAS	OBJEK KINERJA PELAYANAN
	dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian	
	melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	
2	BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	
	menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa	Laporan data aparatur pemerintahan desa
	Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pemerintahan desa	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja sama pemerintahan desa	Laporan APBDes
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset desa	Laporan aset desa
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan desa	Laporan penataan desa
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi perkembangan desa	Laporan evaluasi perkembangan desa
	melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	
3	BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL DASAR	
	menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kelembagaan masyarakat dan sosial dasar	Laporan Indeks Desa Membangun Laporan Aksi 4 – 5 Konvergensi Stunting, Laporan Pemanfaatan

NO	URAIAN TUGAS	OBJEK KINERJA PELAYANAN
		Electronic-Human Development Workers (E-HDW)
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Dokumen aktivitas LPM, Sistem Informasi Posyandu
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat	Dokumen hibah peralatan adat/budaya desa, Laporan layanan sosial dasar skala lokal desa
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan aktualisasi dan pengembangan budaya masyarakat	
	melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	
4	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	
	menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat	Laporan Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi budidaya	Laporan Produk Unggulan Desa
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi pengolahan	

NO	URAIAN TUGAS	OBJEK KINERJA PELAYANAN
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi pemasaran	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kemitraan usaha ekonomi masyarakat	
	melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya	
5	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	
	menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan perdesaan	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna perdesaan	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sarana kawasan perdesaan	
	menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan prasarana kawasan perdesaan	
	melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya	

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 – 2020

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)						Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2021 (berjalan)	
			300	%	100	%	100	%	100	%	100	%	200	%	67%		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)							
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase berjalannya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	300	%	100	%	100	%	100	%	100	%	200	%	67%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan berjalannya kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan berjalannya administrasi keuangan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Pengadaan	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan alat tulis kantor, cetakan dan pengadaan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan kebersihan dan keamanan kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah bulan berjalannya kegiatan koordinasi dan konsultasi	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	300	%	100	%	100	%	100	%	100		200	%	110%	
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan bermotor, genset dan komputer yang tersedia	3	unit	3	unit	0	unit	0	unit	0%	0	unit	3	unit	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan berjalannya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan berjalannya kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	24	unit	7	unit	44	unit	53	unit	120%	0	unit	60	unit	250%
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah berjalannya kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	0	bulan	24	bulan	67%
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	300	%	100	%	100	%	100	%	100		200	%	50%	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	12	laporan	0	laporan	12	laporan	6	laporan	50%	0	laporan	6	laporan	50%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya manusia aparatur pemberdayaan masyarakat	300	%	100	%	100	%	100	%	100		200	%	39%	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	298	buah	136	buah	0	buah	0	buah	0%	0	buah	136	buah	46%
	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemberdayaan masyarakat	6	kegiatan	2	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0%	0	kegiatan	2	kegiatan	33%
	Program Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	42	%	14	%	14	%	14	%	100		42	%	52%	
	Kegiatan Pengembangan Adat Budaya di Kalsel	Jumlah Aparatur/Kab/Kota/Desa/Pengurus Lembaga Adat dan Instansi terkait yang diberi pengetahuan mengenai adat dan budaya	700	orang	178	orang	226	orang	226	orang	100%	0	orang	444	orang	63%
		Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang aktif/diberi reward	30	buah	0	buah	17	buah	17	buah	100%	0	buah	17	buah	57%
	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Layanan Sosial Dasar di Kalsel	Jumlah Aparatur/Kab/Kota/Desa/masyarakat desa yang diberi pembinaan mengenai pengembangan layanan sosial dasar	1061	orang	361	orang	295	orang	81	orang	27%	0	orang	442	orang	42%

	Kegiatan Pengembangan Lembaga Adat dan Budaya di Kalsel	Jumlah lembaga adat dan budaya yang aktif	9	lembaga adat dan budaya	9	9	0	lembaga adat dan budaya	0	lembaga adat dan budaya	0%	0	lembaga adat dan budaya	9	lembaga adat dan budaya	100%
	Kegiatan Pemetaan Identifikasi dan Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM	Jumlah desa per kabupaten berdasarkan status	1864	desa	1864	1864	0	desa	0	desa	0%	0	desa	1864	desa	100%
	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Peran Kelompok dalam Pembangunan Desa	Jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	60	kebmppok	20	60	20	kebmppok	20	kebmppok	100%	0	kebmppok	40	kebmppok	67%
	Kegiatan Bimtek Penyusunan Data IDM	Jumlah orang yang memiliki keterampilan teknis penyusunan data IDM	294	orang	294	294	0	orang	0	orang	0%	0	orang	294	orang	100%
	Kegiatan Pembinaan LPM dan BKAD	Pendataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	1057	lembaga kemasyarakatan	357	1057	0	lembaga kemasyarakatan	0	lembaga kemasyarakatan	0%	0	lembaga kemasyarakatan	357	lembaga kemasyarakatan	34%
	Kegiatan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam program/kegiatan/pameran nasional pemberdayaan masyarakat	13	desa	0	13	0	desa	0	desa	0%	0	desa	0	desa	0%
	Kegiatan Pelatihan Pengurus LPM dan BKAD	Jumlah pengurus LPM dan BKAD yang mengikuti pelatihan	180	orang	180	180	0	orang	0	orang	0%	0	orang	180	orang	100%
	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang berprestasi	234	PKK	54	234	52	PKK	0	PKK	0%	0	PKK	54	PKK	23%
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Upaya Pembangunan Desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah desa per kabupaten berdasarkan status desa	3726	desa	0	3726	1864	0	1864	1864	100%	0	1864	1864	0	50%
	Kegiatan Pokjanal Posyandu	Jumlah posyandu banua yang dbina	52	posyandu	0	52	26	0	11	26	42%	0	26	11	0	21%
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SIP	336	orang	0	336	168	0	0	168	0%	0	168	0	0	0%
		Kesepatan program/kegiatan pokjanal posyandu	26	kab/kota	0	26	13	0	13	13	100%	0	13	13	0	50%
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Jumlah pengurus LPM dan BKAD yang mengikuti pelatihan	360	orang		360	180	0	180	180	100%	0	180	180	0	50%
		Pendataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	700	buah		buah	350	buah	180	buah	51%	0	buah	180	buah	26%

	Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase pemerintahan desa dengan administrasi yang baik	8,04	%	2,68	%	2,68	%	2,68	%	100		8,04	%	29%	
	Kegiatan Bimtek Evaluasi, Monitoring APBDes dan Sapras serta Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah aparaturnya yang dilatih dan kabupaten yang dimonitoring	576	orang	66	orang	170	orang	130	orang	76%	0	orang	186	orang	34%
	Kegiatan Wokshop Penataan Desa, Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah aparaturnya yang difasilitasi terkait penataan desa	437	orang	68	orang	94	orang	0	orang	0%	0	orang	68	orang	16%
	Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi di tingkat provinsi	18	desa	6	desa	11	desa	0	desa	0%	0	desa	6	desa	33%
		Jumlah kelurahan yang dievaluasi di tingkat provinsi	18	kelurahan	6	kelurahan	13	kelurahan	0	kelurahan	0%	0	kelurahan	6	kelurahan	33%
	Kegiatan Wokshop Penataan Produk Hukum dan Administrasi Desa	Jumlah aparaturnya yang dilatih	447	orang	70	orang	110	orang	110	orang	100%	0	orang	180	orang	40%
	Kegiatan Pembangunan Balai Rakyat dan Kantor Desa	Jumlah balai rakyat dan kantor desa yang dibangun	22	balai	0	balai	0	balai	0	balai	0%	0	balai	0	balai	0%
	Kegiatan Sosialisasi Kewenangan dan Kebijakan Desa	Jumlah aparaturnya desa dan SKPD terkait yang disosialisasi	2027	orang	0	orang	2027	orang	0	orang	0%	0	orang	0	orang	0%
	Kegiatan Pelatihan Kerjasama Desa	Jumlah aparaturnya desa yang dilatih terkait kerjasama desa	111	orang	37	orang	44	orang	44	orang	100%	0	orang	81	orang	73%
	Program Peningkatan Kawasan dan Infrastruktur Pedesaan	Persentase sarana prasarana kawasan pedesaan yang terbentuk/berkembang	5,16	%	1,72	%	1,72	%	1,72	%	100		5,16	%	68%	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah kegiatan terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)	12	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	0	kegiatan	8	kegiatan	67%
	Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Jumlah pengurus Posyantek yang dibina	100	orang	100	orang	0	orang	0	orang	0%	0	orang	100	orang	100%
	Kegiatan Gelar/Pameran/Expo TTG	Jumlah kegiatan terkait Gelar/Pameran/Expo TTG	6	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	0	kegiatan	0%	0	kegiatan	2	kegiatan	33%
	Kegiatan Pelatihan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah pengurus yang terlatih	55	orang	55	orang	0	orang	0	orang	0%	0	orang	55	orang	100%
	Kegiatan Pendampingan Kawasan Pedesaan	Jumlah kawasan pedesaan yang aktif	3	buah	3	buah	0	buah	0	buah	0%	0	buah	3	buah	100%
	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kegiatan juara lomba inovasi TTG	60	orang	60	orang	0	orang	0	orang	0%	0	orang	60	orang	100%
	Kegiatan Pembangunan Badan Jalan dan Jembatan Pola Karya Bakti TNI	Jarak terbangunnya badan jalan	14	km	1,65	km	0	km	0	km	0%	0	km	1,65	km	0%
		Jumlah terbangunnya paket jembatan	37	paket jembatan	5	paket jembatan	0	paket jembatan	0	paket jembatan	0%	0	paket jembatan	5	paket jembatan	14%
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Melalui TMMD	Jumlah kabupaten/kota yang menerima rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana umum	18	kab/kota	6	kab/kota	6	kab/kota	6	kab/kota	100%	0	kab/kota	12	kab/kota	67%
	Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pedesaan	Jumlah kawasan pedesaan yang aktif	3	buah	0	buah	3	buah	3	buah	100%	0	buah	3	buah	100%
	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan dan Penerapan Posyantek dan TTG	Jumlah pengurus posyantek dan TTG yang dibina dan dilatih	4	kegiatan	0	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	0	kegiatan	2	kegiatan	50%

Program Pengembangan Potensi Ekonomi Desa	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	8,04		2,68		2,68		2,68		100		8,04		81%			
			%		%		%		%		%		%		%		
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pengurus dan Pembina BUMDES yang dilatih	44	orang	44	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0%	0	orang	44	orang	100%
Kegiatan Pembentukan Kawasan Ekonomi Perdesaan	Jumlah aparatur desa yang dilatih untuk kawasan ekonomi	9	kawasan	3	kawasan	3	kawasan	3	kawasan	100%	0	kawasan	6	kawasan	67%		
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah orang yang dilatih	100	orang	100	orang	0	orang	0	orang	0%	0	orang	100	orang	100%		
Kegiatan Pelatihan Pasar Desa	Jumlah aparatur desa yang terampil	100	orang	100	orang	0	orang	0	orang	0%	0	orang	100	orang	100%		
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan dievaluasi	33	kabupaten	11	kabupaten	11	kabupaten	11	kabupaten	100%	0	kabupaten	22	kabupaten	67%		
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibentuk dan dikembangkan	100	buah	0	buah	50	buah	50	buah	100%	0	buah	50	100	50%		
Rata-rata Capaian (%)																	62%



Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 – 2022

Uraian	Anggaran						Realisasi Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.646.410.000	1.130.090.000	2.372.218.000	2.953.848.000	3.383.125.100	22.087.834.496	55.899.050.892	1.652.798.924	1.080.520.444	2.585.267.252	2.363.993.870	18.391.300.533	52.946.409.791	100%	96%	82%	88%	70%	83%	95%	2.297.138.220	12.782.709.345
Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	1.500.000	164.130.000	0	0	0	0	2.250.000	975.000	0	0	0	0	38%	65%	62%	0%	0%	0%	0%	34.326.000	23.982.857
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	189.000.000	203.000.000	200.000.000	265.000.000	353.937.700		228.000.000	168.159.666	192.314.664	187.220.037	172.543.890		194.528.837	89%	95%	79%	71%	49%	0%	0%	242.187.540	236.349.561
Penyediaan jasa administrasi keuangan	150.000.000	163.100.000	166.000.000	363.996.000	208.506.000		0	139.450.000	149.150.000	355.958.968	208.506.000		0	93%	91%	92%	98%	100%	0%	0%	210.320.400	173.508.667
Penyediaan jasa kebersihan kantor	144.000.000	139.332.000	300.088.000	0	0	0	0	130.143.300	133.564.800			0	0	90%	96%	72%	0%	0%	0%	0%	116.684.000	81.366.186
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	12.000.000	25.000.000	0	0		39.999.800	9.865.000	10.419.300				29.846.500	66%	87%	100%	0%	0%	0%	0%	10.400.000	14.477.467
Penyediaan komponen instalasi listrik-penerangan bangunan kantor	6.000.000	6.500.000	7.000.000	30.000.000	23.000.000	29.966.800	20.033.900	5.835.000	6.454.000	29.692.500	14.987.000	19.559.720	13.609.175	97%	99%	99%	99%	65%	0%	0%	14.500.000	17.476.529
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.600.000	3.300.000	11.000.000	12.000.000	15.600.000	18.700.000	17.100.000	14.767.000	3.171.000	11.274.000	13.183.000	18.700.000	14.767.000	139%	96%	95%	94%	85%	0%	0%	10.500.000	13.209.571
Penyediaan bahan logistik kantor	182.250.000	151.512.000	215.000.000	315.543.000	342.000.000	325.906.400	325.906.400	264.302.618	151.509.850	209.684.870	153.018.750	177.662.850	264.302.618	145%	100%	91%	66%	45%	0%	0%	241.261.000	277.167.203
Penyediaan makanan dan minuman	133.900.000	126.846.000	160.000.000	217.845.000	218.460.000	710.335.000	0	108.822.000	118.504.000	182.885.000	128.408.500	710.335.000	0	81%	93%	92%	84%	59%	0%	0%	171.410.200	220.329.714
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	675.000.000	245.000.000	1.000.000.000	0	0	981801000	998.959.000	674.859.340	241.594.830			286638365	712.371.924	100%	99%	80%	0%	0%	0%	0%	384.000.000	557.231.334
daerah	134.660.000	78.000.000	124.000.000	0	0		0	134.345.000	72.863.000				0	100%	93%	97%	0%	0%	0%	0%	67.332.000	56.057.500
Kantor			366.904.000	437.088.000	950.335.000		0			352.361.180	421.239.140	807.467.707	0	0%	0%	0%	96%	96%	0%	0%	401.996.000	438.581.750
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan			82.560.000	72.500.000			0			61.728.700	55.481.600		0	0%	0%	0%	75%	77%	0%	0%	77.530.000	51.686.667
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				1.300.000.000	1.712.033.400		0			1.194.461.997	1.196.625.990		0	0%	0%	0%	92%	70%	0%	0%	1.506.016.700	1.004.011.133
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	731.750.000	1.296.500.000	2.342.477.000	2.003.041.000	1.028.040.000	818.909.800	1.134.418.000	701.041.725	1.209.441.450	1.795.719.736	812.211.563		194.528.837	96%	93%	92%	90%	79%	0%	0%	1.480.361.600	1.332.061.075
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		566.000.000	991.500.000	330.000.000			0		553.554.700	295.878.000			0	0%	98%	95%	90%	0%	0%	0%	629.166.667	471.875.000
Pengadaan Peralatan Kerja Kantor							0	45.650.000	212.905.000				0	100%	85%	97%	0%	0%	0%	0%	200.310.333	150.232.750
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.650.000	250.000.000	305.281.000				0	45.650.000	212.905.000				0	100%	85%	97%	0%	0%	0%	0%	200.310.333	150.232.750
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	493.100.000	287.200.000	764.696.000	1.091.080.000	330.000.000		0	482.983.750	273.805.000	1.074.079.119	260.008.285		0	98%	95%	89%	98%	79%	0%	0%	593.215.200	492.659.958
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	162.000.000	179.300.000	240.000.000	312.680.000	389.240.000	614.870.000	615.890.000	144.147.975	167.473.750	255.657.107	311.518.788	318.146.222	565.122.819	89%	93%	88%	82%	80%	0%	0%	256.644.000	356.589.711
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	5.000.000	12.000.000				0	10.000.000	1.640.000				0	100%	33%	48%	0%	0%	0%	0%	9.000.000	6.750.000

Uraian	Anggaran						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	3.000.000	10.000.000				300000000	3.000.000	0	4.950.000				197700000	60%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	6.000.000	79.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja	1.000.000		1.000.000					260.000		300.000					26%	#DIV/0!	30%	0%	0%	0%	0%	1.000.000	630.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	15.000.000	6.000.000	18.000.000					15.000.000	63.000	13.783.300					100%	1%	77%	0%	0%	0%	0%	13.000.000	13.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				199.281.000	224.300.000	80.359.800	105.748.000				140.678.600	218.209.240	27.962.140	105.500.000	0%	0%	0%	71%	97%	0%	0%	211.790.500	152.422.200
Kantor				70.000.000	84.500.000	123.680.000	112.780.000				29.426.910	22.475.250	66.095.000	62.257.200	0%	0%	0%	42%	27%	0%	0%	77.250.000	97.740.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.000.000	0	32.000.000	0	0			36.000.000	0	32.000.000	0	0		100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	13.600.000	13.600.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan	36.000.000		32.000.000				26100000	36.000.000		32.000.000				26100000	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	34.000.000	31.366.667
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123.340.000	0	492.600.000	0	0			90.075.800	0	393.271.830	0	0		73%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	123.188.000	116.535.160
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat	123.340.000		492.600.000					90.075.800		393.271.830					73%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	307.970.000	291.337.900
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	12.900.000	10.800.000	509.867.100	265.100.000			18.300.000	11.400.000	0	0	210.745.015			92%	88%	0%	0%	79%	0%	0%	163.733.420	163.393.420
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	12.900.000	10.800.000	509.867.100	265.100.000		138.790.100	18.300.000	11.400.000	0		210.745.015	324.891.329	137.143.664	92%	88%	0%	0%	79%	0%	0%	163.733.420	159.292.867
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur	0	0	0	501.430.000	0	0	25.050.000	0	0	0	415.478.710	0		0%	0%	0%	83%	0%	0%	0%	0%	100.286.000	75.211.429
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur				473.430.000							388.278.710				0%	0%	0%	82%	0%	0%	0%	473.430.000	473.430.000
Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu				28.000.000			25050000				27.200.000			21900000	0%	0%	0%	97%	0%	0%	0%	28.000.000	26.525.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.332.800.000	534.450.000	5.168.100.000	0	0	10.513.878.600	1.458.445.800	891.932.850	490.181.800	3.571.285.998	0	0			67%	92%	69%	0%	0%	0%	0%	1.407.070.000	2.652.401.036
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	264.800.000							193.811.000							73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	264.800.000	193.811.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat	350.000.000							331.454.600							95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	350.000.000	331.454.600
Perdesaan	259.000.000							54.630.600							21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	259.000.000	54.630.600
Pembinaan Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	150.000.000							145.714.000							97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	150.000.000	145.714.000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	309.000.000							166.322.650							54%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	309.000.000	166.322.650
Pelatihan Penataan dan Penyusunan Profil Desa Kelurahan		57.550.000	179.000.000						52.574.500	140.284.000					0%	0%	78%	0%	0%	0%	0%	118.275.000	118.275.000
Desa		40.000.000	120.000.000						30.957.500	18.432.000					0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	80.000.000	80.000.000
Pelatihan Administrasi Desa		103.250.000	731.500.000						93.109.100	588.670.950					0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	417.375.000	417.375.000
Pengembangan Penerapan dan Permasalahatan TTG		169.200.000	146.650.000						158.359.400	134.314.000					0%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	157.925.000	157.925.000
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat		97.300.000	218.100.000						95.868.800	193.986.300					0%	0%	89%	0%	0%	0%	0%	157.700.000	157.700.000
Integrasi Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		67.150.000	146.200.000						59.312.500	112.710.800					0%	0%	77%	0%	0%	0%	0%	106.675.000	106.675.000
Gelar Ekspo Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan			155.700.000							21.745.300					0%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	155.700.000	155.700.000

Uraian	Anggaran					Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG			160.000.000							157.974.000					0%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	160.000.000	160.000.000
Workshop Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar			174.000.000							168.474.800					0%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	174.000.000	174.000.000
Penataan Desa			120.000.000			201847000	117528000			72.275.200			172562000	98823399	0%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	120.000.000	146.458.333
Pengembangan Adat Budaya di Desa			162.750.000							141.488.800					0%	0%	87%	0%	0%	0%	0%	162.750.000	162.750.000
Pemberdayaan Sosial Dasar			180.000.000							147.699.300					0%	0%	82%	0%	0%	0%	0%	180.000.000	180.000.000
Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan dan			148.400.000							119.642.000					0%	0%	81%	0%	0%	0%	0%	148.400.000	148.400.000
Evaluasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengunaan Dana Desa			140.150.000							101.303.273					0%	0%	72%	0%	0%	0%	0%	140.150.000	140.150.000
Pendampingan Kunjungan Kerja Terkait Dana Desa dan Sarana Prasarana Desa			120.000.000							32.977.300					0%	0%	27%	0%	0%	0%	0%	120.000.000	120.000.000
Analisa Pengembangan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal			140.200.000							117.979.328					0%	0%	84%	0%	0%	0%	0%	140.200.000	140.200.000
Pengkajian Kualitas Kesehatan Masyarakat Desa			170.200.000							156.352.000					0%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	170.200.000	170.200.000
Sosialisasi Produk Hukum Desa			224.400.000				0			193.017.000				0	0%	0%	86%	0%	0%	0%	0%	224.400.000	112.200.000
Penataan Produk Hukum Desa			147.400.000			134406200	94332800			135.864.000			85226959	84552559	0%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	147.400.000	125.379.667
Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa			247.800.000			293174000	293671000			196.230.549			199860791	222671470	0%	0%	79%	0%	0%	0%	0%	247.800.000	278.215.000
Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa			961.800.000							275.186.000					0%	0%	29%	0%	0%	0%	0%	961.800.000	961.800.000
Gelar/Pameran/Expo TTG			213.800.000			9884451400	952914000			201.175.000			790920400	878799631	0%	0%	94%	0%	0%	0%	0%	213.800.000	3.683.721.800
Pemetaan Identifikasi dan Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM			160.050.000							143.504.098					0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	160.050.000	160.050.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan																							
Peningkatan Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	1.911.050.000	0	0	0	0		1.139.117.354		0	0	0	0			60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	382.210.000	227.823.471
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	890.550.000						423.112.944								48%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	890.550.000	423.112.944
Pengembangan Bumdes dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan	98.000.000						53.442.710								55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98.000.000	53.442.710
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	580.000.000					2269991600	436339000			462.005.800			2210022669	421661266	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	580.000.000	1.056.112.133
Pembinaan Kelembagaan Program	60.000.000						43.662.000								73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60.000.000	43.662.000
Penanggulangan Kemiskinan	282.500.000						156.893.900								56%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	282.500.000	156.893.900
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	13.321.475.000	608.450.000	2.227.400.000	0	0		#####	539.642.634	1.814.866.294	0	0				94%	89%	81%	0%	0%	0%	0%	3.231.465.000	3.059.097.177
Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan	148.050.000						106.684.090								72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	148.050.000	106.684.090
Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemes Kelurahan	505.925.000						453.167.800								90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	505.925.000	453.167.800
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Di Kalsel	1.160.000.000						873.462.786								75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.160.000.000	873.462.786
Pengembangan, Penerapan dan Pemasarakan TTG	300.000.000						262.715.000								88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	300.000.000	262.715.000
Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA	246.000.000						197.822.899								80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	246.000.000	197.822.899
Pembinaan Kelembagaan Posyantek	150.000.000						131.454.500								88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	150.000.000	131.454.500
Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pedesaan	155.500.000						119.036.300								77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	155.500.000	119.036.300

Uraian	Anggaran					Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000							95.436.500							95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.000.000	95.436.500
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Penunjang TMMD)	10.496.000.000	280.000.000						10.163.881.009	268.592.000						97%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	5.388.000.000	5.221.940.505
Perencanaan Design Balai Rakyat	60.000.000							55.975.000							93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60.000.000	55.975.000
Koordinasi Sarana dan Prasarana Perdesaan		50.000.000							38.358.500	441.775.213					0%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	50.000.000	50.000.000
Evaluasi Pengembangan Desa/Kelurahan		200.000.000	500.000.000						172.346.000						0%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	350.000.000	350.000.000
Pengembangan Usaha Masyarakat di Desa Tertinggal dan Terluar		78.450.000							60.346.134						0%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	78.450.000	78.450.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Melalui TMMD			639.500.000							605.955.050					0%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	639.500.000	639.500.000
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa			248.100.000							168.652.650					0%	0%	68%	0%	0%	0%	0%	248.100.000	248.100.000
Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Peran Kelompok Dalam Pembangunan Desa			192.900.000							160.795.000					0%	0%	83%	0%	0%	0%	0%	192.900.000	192.900.000
Pengembangan Pasar Desa			174.000.000							110.250.400					0%	0%	63%	0%	0%	0%	0%	174.000.000	174.000.000
Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan			137.250.000							68.334.990					0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	137.250.000	137.250.000
Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan			192.500.000							141.491.991					0%	0%	74%	0%	0%	0%	0%	192.500.000	192.500.000
Rehabilitasi SDA			143.150.000							117.611.000					0%	0%	82%	0%	0%	0%	0%	143.150.000	143.150.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	693.175.000	0	0	0	0	194.007.900	147.720.900	635.128.500	0	0	0	0	166.115.586	123.223.184	92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	138.635.000	139.551.043
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan	494.575.000							457.721.600							93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	494.575.000	457.721.600
Penataan dan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	198.600.000					194007900	147720900	177.406.900					166115586	123223184	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	198.600.000	173.045.233
Program Pengembangan Potensi Masyarakat dalam Pembangunan	0	66.182.325.000	85.610.500.000	0	0	0	0	0	64.940.869.547	77.820.319.310	0	0	0	0	#DIV/0!	98%	91%	0%	0%	0%	0%	30.358.565.000	21.684.689.286
Pembangunan Balai Rakyat		5.000.000.000							4.128.385.647						0%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembuatan Badan Jalan Pola TMMD Ruas Banjar-Batolicin		59.500.000.000							59.346.237.900						0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	59.500.000.000	59.500.000.000
Penyusunan Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Pola Ruas Banjar-Batolicin		1.182.325.000							984.416.000						0%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	1.182.325.000	1.182.325.000
Penyusunan DED Pembangunan Balai Rakyat Tahap 2		500.000.000							481.830.000						0%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	500.000.000	500.000.000
Pembangunan Balai Rakyat			5.610.500.000							4.963.344.000					0%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	5.610.500.000	5.610.500.000
Pembangunan Badan Jalan dan Jembatan Pola Karya Bakti TNI Ruas Banjar-Batolicin			80.000.000.000							72.856.975.310					0%	0%	91%	0%	0%	0%	0%	80.000.000.000	80.000.000.000
Masyarakat	-	426.750.000	9.147.161.000	-	-			-	384.872.359	5.252.497.965	-	-			0%	90%	57%	0%	0%	0%	0%	1.914.782.200	1.914.782.200
Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Masyarakat		77.000.000							69.607.300						0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	77.000.000	77.000.000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		183.200.000							170.803.759						0%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	183.200.000	183.200.000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa		106.550.000							87.243.700						0%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	106.550.000	106.550.000
Penguatan Kelembagaan Posyantek		60.000.000							57.217.600						0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	60.000.000	60.000.000
Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa			120.000.000							56.809.000					0%	0%	47%	0%	0%	0%	0%	120.000.000	120.000.000
Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa			356.600.000							306.071.564					0%	0%	86%	0%	0%	0%	0%	356.600.000	356.600.000

Uraian	Anggaran					Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			530.150.000							267.528.856					0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	530.150.000	530.150.000
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa			191.400.000							150.798.350					0%	0%	79%	0%	0%	0%	0%	191.400.000	191.400.000
Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			6.100.000.000							3.030.803.755					0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	6.100.000.000	6.100.000.000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa			687.111.000							410.106.940					0%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	687.111.000	687.111.000
Pengembangan Lembaga Adat dan Budaya Di Kalsel			496.000.000							442.634.000					0%	0%	89%	0%	0%	0%	0%	496.000.000	496.000.000
Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga			345.500.000							300.372.500					0%	0%	87%	0%	0%	0%	0%	345.500.000	345.500.000
Pembinaan dan Evaluasi Posyantek			137.250.000							120.135.000					0%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	137.250.000	137.250.000
Pelatihan Posyantek Desa			183.150.000							167.238.000					0%	0%	91%	0%	0%	0%	0%	183.150.000	183.150.000
Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	0	0	0	1.302.756.000	1.037.425.000			0	0	0	1.184.077.221	864.839.952	0	0	0%	0%	0%	91%	83%	0%	0%	468.036.200	468.036.200
Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa				300.638.000							290.323.201				0%	0%	0%	97%	0%	0%	0%	300.638.000	300.638.000
Pembentukan Kawasan Ekonomi Perdesaan				280.428.000	228.000.000						224.442.761	187.872.000			0%	0%	0%	80%	82%	0%	0%	254.214.000	254.214.000
Pelatihan Kewirausahaan				307.740.000	331.875.000						265.178.623	251.106.426			0%	0%	0%	86%	76%	0%	0%	319.807.500	319.807.500
Pelatihan Pasar Desa				209.475.000							203.978.550				0%	0%	0%	97%	0%	0%	0%	209.475.000	209.475.000
Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa				204.475.000							200.154.286				0%	0%	0%	98%	0%	0%	0%	204.475.000	204.475.000
Program Pembinaan Pemerintahan Desa	0	0	0	477.550.000				0	0	0	425.861.526		0	0	0%	0%	0%	0%	89%	0%	0%	477.550.000	477.550.000
Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan				2.602.276.000	1.279.873.255			0	0	0	2.148.262.580	846.497.889	0	0	0%	0%	0%	83%	66%	0%	0%	776.429.851	776.429.851
Workshop Penataan dan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan				628.428.000	58.591.200						524.976.528	54.002.500			0%	0%	0%	84%	92%	0%	0%	343.509.600	343.509.600
Bimtek Evaluasi, Monitoring APBDes dan Sapras serta Kualitas Pelayanan Pemerintahan				390.000.000	188.526.000						354.327.200	148.090.200			0%	0%	0%	91%	79%	0%	0%	289.263.000	289.263.000
Workshop Penataan Produk Hukum dan Administrasi Desa				809.000.000	355.537.500						595.702.172	154.390.520			0%	0%	0%	74%	43%	0%	0%	582.268.750	582.268.750
Pelatihan Kerjasama Desa				621.420.000	471.760.000						531.324.362	284.556.114			0%	0%	0%	86%	60%	0%	0%	546.590.000	546.590.000
Sosialisasi Kewenangan dan Kebijakan Desa				153.428.000							141.932.318				0%	0%	0%	93%	0%	0%	0%	153.428.000	153.428.000
Program Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa	0	0	0	205.458.555				0	0	0	205.458.555		0	0	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	205.458.555	205.458.555
Pembinaan LPM dan BKAD				8.190.839.500	3.573.796.000			0	0	0	7.180.953.016	2.842.055.116	1.477.921.045	1.119.408.746	0%	0%	0%	88%	80%	0%	0%	2.352.927.100	2.352.927.100
Pemetaan Identifikasi dan Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM				224.928.000							217.371.118				0%	0%	0%	97%	0%	0%	0%	224.928.000	224.928.000
Pelatihan Pengurus LPM dan BKAD				419.428.000							359.609.900				0%	0%	0%	86%	0%	0%	0%	419.428.000	419.428.000
Pengembangan Lembaga Adat dan Budaya di Kalsel				1.126.708.500							987.891.900				0%	0%	0%	88%	0%	0%	0%	1.126.708.500	1.126.708.500
				250.000.000							244.595.000				0%	0%	0%	98%	0%	0%	0%	250.000.000	250.000.000



Uraian	Anggaran					Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Gelar Bakti Gotong Royong Masyarakat				54.200.000							32.766.200				0%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	54.200.000	54.200.000
Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Peran Kelompok dalam Pembangunan Pembinaan Pengembangan Layanan Sosial Dasar di Kalsel				807.479.000	354.359.000						716.806.050	276.378.900			0%	0%	0%	89%	78%	0%	0%	580.919.000	580.919.000
Bintek Penyusunan Data IDM Kalsel				1.009.836.000	335.822.000						818.561.750	190.220.301			0%	0%	0%	81%	57%	0%	0%	672.829.000	672.829.000
Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga				575.470.000							559.034.300				0%	0%	0%	97%	0%	0%	0%	575.470.000	575.470.000
Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya pembangunan desa melalui Indeks Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)				559.090.000	790.000.000						515.715.000	645.796.000			0%	0%	0%	92%	82%	0%	0%	674.545.000	674.545.000
Pembinaan Poljanal Posyandu				3.163.700.000	88.907.000						2.728.601.798	82.273.035			0%	0%	0%	86%	93%	0%	0%	1.626.303.500	1.626.303.500
Program Peningkatan Kawasan dan Infrastruktur	0	0	0	12.557.845.300	1.314.762.200	4.149.719.200	39.749.636.200	0	0	0	9.574.823.483	1.230.306.562	3.864.556.350	38.894.376.227	0%	0%	0%	76%	94%	0%	0%	2.774.521.500	8.253.137.557
Pelatihan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Pembangunan Sarana dan Prasarana Melalui TMMD				116.217.300							73.688.900				0%	0%	0%	63%	0%	0%	0%	116.217.300	116.217.300
Pendampingan Kawasan Pedesaan				738.856.000		4149719200	39749636200				702.799.687		3864556350	38894376227	0%	0%	0%	95%	0%	0%	0%	738.856.000	14.879.403.800
Gelar/Pameran/ Expo TTG				305.000.000							137.463.825				0%	0%	0%	45%	0%	0%	0%	305.000.000	305.000.000
Pembangunan Badan Jalan dan Jembatan Pola Karya Bakti TNI				532.000.000							430.116.600				0%	0%	0%	81%	0%	0%	0%	532.000.000	532.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan dan Pemanfaatan				9.683.144.000							7.143.817.153				0%	0%	0%	74%	0%	0%	0%	9.683.144.000	9.683.144.000
Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna				497.228.000	271.009.200						463.836.318	251.562.200			0%	0%	0%	93%	93%	0%	0%	384.118.600	384.118.600
Pembinaan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna				258.650.000							239.092.000				0%	0%	0%	92%	0%	0%	0%	258.650.000	258.650.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Melalui TMMD				426.750.000							384.009.000				0%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	426.750.000	426.750.000
Gelar/Pameran/ Expo TTG Kawasan Pedesaan					682.306.000						666.738.538				0%	0%	0%	0%	98%	0%	0%	682.306.000	682.306.000
Pembinaan Pemanfaatan dan Penerapan Posyantek dan TTG					27.000.000						19.498.000				0%	0%	0%	0%	72%	0%	0%	27.000.000	27.000.000
					93.475.000						87.003.524				0%	0%	0%	0%	93%	0%	0%	93.475.000	93.475.000
					240.972.000						205.504.300				0%	0%	0%	0%	85%	0%	0%	240.972.000	240.972.000
TOTAL	19.816.000.000	70.191.465.000	107.403.256.000	30.621.902.900	11.882.121.555	22.087.834.496	55.899.050.892	17.624.031.037	68.656.928.234	92.976.448.916	24.884.581.998	9.170.649.967	18.391.300.533	52.946.409.791	89%	98%	87%	81%	77%	83%	95%	47.982.949.091	45.101.380.269



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan strategi kebijakan yang tepat. Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi individu atau organisasi.

Logikanya pilihan strategi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas faktor internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatanyang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

ANALISIS SWOT

INTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
EKSTERNAL	OPPORTUNITY	THREATS

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatanberupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatandalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri dan sejahtera.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan baik faktor internal maupun eksternal yaitu :

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada

sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Kekuatan dan kelemahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

- Tersedianya regulasi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas PMD Provinsi Kalsel memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatur terkait kebijakan strategis, wewenang dan tanggung jawab urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Indikator kinerja yang selaras dari baik di level SKPD maupun pegawai dalam upaya peningkatan status desa
Keselarasan ini dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2021 yakni Meningkatnya Status Desa Maju menjadi Mandiri yang kemudian diturunkan dalam IKU Level III dan Level IV sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa dengan IKU level III yakni:
 - Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa yang aktif
 - Meningkatnya kemampuan kader dan pendamping desa dalam pembangunan desa
 - Meningkatnya lembaga adat dan budaya desa yang aktif
 - Meningkatnya layanan sosial dasar yang aktif di desa
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dengan IKU level III yakni:
 - Meningkatnya aparatur desa yang mampu mengelola administrasi pemerintahan desa
 - Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam mengidentifikasi potensi desa yang dikerjasamakan
 - Meningkatnya aparatur desa yang terampil dalam SISKEUDES
 - Meningkatnya desa dalam penginventarisasian aset sesuai dengan regulasi
 - Meningkatnya desa berprestasi melalui evaluasi perkembangan desa
 - Meningkatnya desa yang memiliki profil paling terbaru
 - Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam melaksanakan penataan desa



- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan IKU level III :
 - Meningkatnya BUMDesa yang maju
 - Meningkatnya pasar desa yang aktif
 - Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan ekonomi perdesaan
- d. Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan dengan IKU level III :
 - Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang dibangun dan diperbaiki
 - Meningkatnya peran kelompok masyarakat desa yang diberdayakan dalam pemulihan dan pemanfaatan sumber daya alam
 - Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- Tersedianya dukungan dokumen perencanaan yang menggambarkan kinerja Dinas PMD Provinsi Kalsel

Dokumen perencanaan Dinas PMD Provinsi Kalsel baik Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan, Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Laporan Kinerja Tahunan disusun dengan memperhatikan perencanaan dan pencapaian kinerja yang ada.

b. Kelemahan

- Sumber daya aparatur yang terbatas dalam pelaksanaan program kegiatan
 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai pada Dinas PMD Provinsi Kalsel tergambar bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada belum mencukupi untuk menjalankan tugas dan fungsi SKPD secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai yang juga diikuti dengan peningkatan kompetensinya serta penempatan pegawai sesuai dengan kinerja yang diperlukan.

BUP, Pindah, dll					Kekurangan Pegawai				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
0	1	2	1	2	82	83	84	83	84

Sumber : Data Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Kalsel

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak jumlah sumber daya aparatur yang diperlukan dengan rata-rata kekurangan pegawai setiap tahunnya berjumlah lebih dari 80 orang sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas PMD Provinsi Kalsel baru berjumlah 33 orang.



- Sarana Prasarana pada Dinas PMD Provinsi Kalsel yang masih belum menunjang pencapaian kinerja secara maksimal

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel adalah sarana prasarana yang masih belum memadai dalam menunjang kinerja yang dilaksanakan seperti kurangnya ketersediaan komputer dan laptop sehingga tidak jarang pegawai menggunakan laptop pribadi dalam pengerjaan kegiatan kantor. Kondisi ini tergambar dalam tabel Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	USULAN BARANG MILIK DAERAH				KEBUTUHAN MAKSIMUM		KEBUTUHAN RIIL BMD	
		KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Sepeda Motor</u>								
1.	- Pengadaan Sepeda Motor Roda 2	2.3.1.5.1	Sepeda Motor	4	unit	13	unit	13	unit
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor								
	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin</u>								
2	- Pengadaan AC 2 PK	2.6.2.4.4	Ac. Split	8	unit	49	unit	49	unit
	Belanja Modal Pengadaan Komputer								
	<u>Pengadaan Laptop dan Komputer/PC Unit</u>								
3	- Pengadaan Lap Top	2.6.3.2.2	Lap Top	10	unit	13	unit	13	unit
4	- Pengadaan Komputer/P.C. Unit	2.6.3.2.1	P.C. Unit	13	unit	47	unit	47	unit
	Belanja Modal Pengadaan Printer								
5	- Pengadaan Printer	2.6.3.4.8	Printer	13	unit	38	unit	38	unit
6	- Kamera	2.6.2.6.21	Camera Video	1	buah	5	buah	5	buah
7	- Drone	2.6.2.6.21	Camera Video	1	unit	1	unit	1	unit
8	- Proyektor	2.7.2.6.3	Slide Projector (Lapangan)	1	buah	6	buah	6	buah

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatannamun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan instansi.

Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Adapun peluang–ancaman yang diidentifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

a. Peluang

- Adanya dukungan dari SKPD lain terhadap pencapaian kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas PMD Provinsi Kalsel perlu mendapatkan dukungan dari SKPD lain yang tergambar pada *crosscutting* pohon kinerja. Beberapa SKPD dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian Dinas PMD Provinsi Kalsel antara lain:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Desa Ramah Anak di Desa, keterlibatan perempuan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan penanganan perkawinan anak di Desa
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait keberadaan taman bacaan dan perpustakaan desa
 - Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan PAMSIMAS , sarana prasarana dasar (jalan, jembatan, dll) di Desa
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan usaha peningkatan ekonomi masyarakat desa
- Adanya kebijakan kabupaten/kota yang mendukung pencapaian desa mandiri
Upaya peningkatan status desa sebagai target kinerja selaras dengan kebijakan kabupaten/kota yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota. Pada RPJMD 2017-2022 Kabupaten Balangan, peningkatan status desa merupakan bagian dari misi RPJMDnya yakni mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan kota yang dicapai melalui peningkatan status desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi mandiri.

Pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut, Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi salah satu indikator kinerja program prioritas yang menyumbang pencapaian tujuan peningkatan upaya membina desa dan menata kota. Pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Indeks Desa



Membangun (IDM) menjadi indikator sasaran dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan.

RPJMD 2019-2024 Kabupaten Tabalong menempatkan IDM sebagai indikator sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa pada tujuan memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan dengan misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Ancaman

- Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal

Meskipun jumlah desa dengan status desa tertinggal terus menurun setiap tahunnya namun masih terdapat desa tertinggal dengan gambaran pada tabel berikut:

N O	NAMA KABUPATEN	REKAPITULASI DESA TERTINGGAL TAHUN 2016-2020			
		2016	2018	2019	2020
1	TANAH LAUT	81	55	15	4
2	KOTABARU	114	94	55	28
3	BANJAR	180	115	80	49
4	BARITO KUALA	147	125	51	23
5	TAPIN	84	61	21	11
6	HULU SUNGAI SELATAN	87	39	12	2
7	HULU SUNGAI TENGAH	100	45	17	9
8	HULU SUNGAI UTARA	151	131	87	60
9	TABALONG	64	54	11	6
10	TANAH BUMBU	67	49	30	17
11	BALANGAN	109	91	28	14
TOTAL		1184	853	407	223

Sumber : Data Indeks Desa Membangun 2016 s/d 2020

- Regulasi Pemerintah Pusat terkait kewenangan Provinsi atas desa yang tidak konsisten maupun saling bertentangan

Terdapat perbedaan kewenangan Provinsi terkait desa terutama dalam kaitannya dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel antara lain:



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
Kewenangan terkait penataan desa			
Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.		Pemerintah, Pemmerintah Daerah Provinsi dan Pemkab/kota dapat melakukan penataan desa berupa pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa	
Kewenangan terkait pembangunan kawasan perdesaan			
Tidak terdapat kewenangan		Pemerintah Provinsi ikut serta melakukan pembahasan terhadap rancangan pembangunan kawasan perdesaan	
Kewenangan terkait BUMDesa			
Tidak terdapat kewenangan		Pemerintah Provinsi mendorong perkembangan BumDesa melalui pemberian hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan SDA di desa	

Tabel 5.2 Tabel Identifikasi SWOT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL			
Strenghts (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)	
S1	Tersedianya regulasi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	W1	Sumber daya aparatur yang terbatas dalam pelaksanaan program kegiatan
S2	Indikator kinerja yang selaras dari level pelaksana hingga kepala dinas dalam upaya mencapai peningkatan status desa	W2	Sarana Prasarana pada Dinas PMD Provinsi Kalsel yang masih belum menunjang pencapaian kinerja secara maksimal
S3	Tersedianya dukungan dokumen perencanaan		
IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL			
Oppotunities (Peluang)		Threats (Ancaman)	
O1	Adanya dukungan dari SKPD lain terhadap pencapaian kinerja	T1	Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal
O2	Adanya kebijakan kab/kota yang mendukung pencapaian desa mandiri (data rpjmd kab, peraturan kab)	T2	Regulasi Pemerintah Pusat yang tidak konsisten maupun saling bertentangan (regulasi apa saja?)

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut *empowerment* adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa serta memberikan tanggung jawab tersendiri kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel perlu terlebih dahulu mengidentifikasi akar – akar permasalahan dan masalah yang dihadapi selama ini. Identifikasi atas keduanya berperan penting untuk menetapkan isu – isu strategis Dinas PMD Provinsi Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akar – akar permasalahan dan masalah yang dapat diidentifikasi pada Dinas PMD Provinsi Kalsel yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Akar Masalah, Masalah dan Masalah Pokok untuk Penentuan Isu Strategis

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Bina Pemerintahan Desa			
1.	Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi perdesaan (manajemen usaha)	Belum optimalnya peran BUMDesa di desa	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi BUMDesa di desa masih rendah
		Belum optimalnya pengelolaan pasar desa	<ul style="list-style-type: none"> •
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pembentukan jaringan kemitraan ekonomi desa • Belum optimalnya produk unggulan perdesaan • Belum semua desa menerapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan jaringan kemitraan ekonomi desa masih rendah • Produk unggulan perdesaan masih rendah • Kerjasama antar desa dengan lembaga non pemerintah masih rendah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kerjasama desa dengan lembaga non pemerintah	
		Belum semua desa mempunyai regulasi tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Aparatur desa belum memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
2.	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan	Belum semua masyarakat desa melakukan peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya di desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa masih rendah
		Belum optimalnya sinergitas lintas sektor antara SKPD di Provinsi dan Kabupaten mengenai peningkatan layanan sosial dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendidikan, kependudukan, hunian yang layak dan kesehatan dan gizi keluarga di perdesaan masih rendah • Terdapat perkawinan anak di bawah umur di desa • Terdapat penyalahgunaan NAPZA di desa
3.	Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua desa melakukan pengembangan sarana dan prasaranya untuk mendukung kawasan perdesaan dalam bentuk regulasi • Belum optimalnya pengelolaan desa wisata • Belum semua kabupaten menerapkan desa tematik 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa yang memiliki regulasi tentang pembangunan kawasan perdesaan masih rendah • Pembangunan desa menjadi desa wisata masih rendah • Pembangunan desa menjadi desa tematik (berciri khas) masih rendah
		Rendahnya pengembangan kawasan perdesaan untuk mendorong	Aparatur desa belum memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi tentang pembinaan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		keterkaitan desa-kota	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
4.	Rendahnya Indeks Desa Membangun	Belum semua desa mempunyai aparatur desa yang memahami pengelolaan pemerintahan desa dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan kepala desa masih belum dikelola dengan baik • Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah • Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa masih belum baik • SOTK pemerintah desa masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku • SOP pemerintah desa masih belum ada
		Belum semua desa memiliki administrasi keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat desa yang masih belum tertib terkait administrasi pengelolaan aset desa • Terdapat desa yang belum menerapkan pengadaan barang dan jasa secara terbuka untuk public
4.	Rendahnya Indeks Desa Membangun	Belum semua desa menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis ITE	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat desa yang belum menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa • Terdapat desa yang belum menerapkan sistem informasi pengelolaan aset desa • Terdapat desa yang belum mendapatkan jaringan internet

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021-2026

3.2.1 Visi Kepala Daerah 2021-2026

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026 yaitu: **“Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”**.

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut terdapat tiga elemen utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni Makmur Sejahtera, Berkelanjutan dan Gerbang Ibukota Negara. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan terhadap lima elemen utama tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Lima Elemen Utama Prioritas Pemprov Kalimantan Selatan

Kondisi Lima Tahun Kedepan	Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Makmur Sejahtera, Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan Sentosa	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di desa secara jasmani, rohani, aman dan sentosa
Berkelanjutan, Pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan	Pembangunan desa dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi desa, menurunkan kemiskinan di desa dan meningkatkan kualitas lingkungan di desa.
Gerbang Ibukota Negara, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibukota Negara yang Baru. Kalimantan Selatan dari letaknya yang strategis menjadi Ibukota Negara Baru.	

3.2.2 Misi Kepala Daerah 2021 - 2026

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur;
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata;
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik;
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Misi-misi ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana proyek prioritas daerah dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Misi dan Rencana Proyek Prioritas Daerah RPJMD

No	Misi	Rencana Proyek Prioritas Daerah
1.	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat melalui ketahanan terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak, stunting, AKI/AKB berbasis pemberdayaan dasawisma - Meningkatkan pendidikan vokasi berbasis <i>Link and Match</i> berkeluaran sesuai dengan dunia usaha - Beasiswa untuk masyarakat tidak mampu jenjang SMA dan S1. Beasiswa S1, S2, S3 untuk ASN - Memperkuat Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keterampilan berbasis digital - Memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya - Meningkatkan Indeks Kepemudaan dan Prestasi Olahraga
2.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong ekonomi syariah (memperkuat BAZNAS) - Hilirisasi Industri Pertambangan dan Pertanian - Mengembangkan pariwisata berbasis alam (Ekowisata) - Mendorong Ekonomi Kreatif Kearifan Lokal Berbasis Teknologi Digital - Mendorong perdagangan berbasis Ekonomi Digital
3.	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan sarana prasarana dasar untuk standar hidup layak - Pembangunan Kawasan Ekonomi Baru mendukung IKN - Meningkatkan konektivitas kawasan pertumbuhan ekonomi - Pemenuhan sarana prasarana pendukung perekonomian - Penyediaan sumber energi terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi - Pemenuhan kecepatan akses internet dan pengurangan <i>blank spot</i>
4.	Tata Kelola Pemerintahan yg Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan <i>Smart Province</i> (Provinsi Cerdas) - Mempermudah perijinan dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS) - Menjaga stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam)
5.	Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Memperkuat Ketahanan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan ramah lingkungan - Revolusi Hijau - Pengendalian kebakaran hutan dan lahan - Pengendalian banjir - Pengendalian pencemaran lingkungan

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada pematapan fondasi pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah, dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD dan memiliki peran pada misi 2, 4 dan 5.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa RPJMN 2020 - 2024

Arah kebijakan	Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; 2. Penetapan batas desa; 3. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMdes Bersama; 4. Peningkatan pelayanan dasar desa; 5. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping local desa; dan 6. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Adapun isu strategis yang dimiliki oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Tabel 3.5 Isu Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Aspek	Isu-isu Strategis
Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama • Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan • Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam local sebagai produk unggulan perdesaan • Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi
Sosial, Budaya dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan stunting di desa • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan • Potensi konflik pertanahan • Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial • Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan <i>clear and clean</i> (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana)
Sarana dan Prsarana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi,elektrifikasi) • Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan dan antar kawasan • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online) • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan kawasan perdesaan
Tatakelola (manajemen)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya pemanfaatan dana • Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi) • Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan • Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada

Aspek	Isu-isu Strategis
	masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung <i>good governance</i>

Salah satu kebijakan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yakni adanya Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit dengan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada maka disusun target kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang nantinya menjadi dasar bagi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target Kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Satuan
			2022	2023	2024	
1.	Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan					
	a. Berkembang nya status pembangunan desa	Jumlah desa mandiri	3.944	5.444	6.444	Desa
		Jumlah desa berkembang	56.791	58.291	59.291	Desa
		Jumlah desa tertinggal	14.402	11.652	9.152	Desa
	b. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	55,5	57,2	58,70	Nilai
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	54	55,5	57	Nilai
	c. Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan	Persentase kemiskinan di perdesaan	11,60	10,80	9,90	Persentase
2.	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi					
	a. Terevitalisasi nya BUMDesa	Jumlah BUMDesa berkembang	7.500	9.000	10.000	BUMDesa
		Jumlah BUMDesa maju	1.150	1.450	1.800	BUMDesa

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Satuan
		2022	2023	2024	
b. Terevitalisasi nya BUMDesa Bersama	Jumlah BUMDesa Bersama berkembang	245	270	300	BUMDes ma
	Jumlah BUMDesa Bersama maju	155	175	200	BUMDes ma
c. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di perdesaan	1,75	2	2,50	Persentase

Sumber : Dokumen Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 s/d 2024

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan salah satu kementerian/lembaga yang berbasis kewilayahan dengan target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian. Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas tersebut pada Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian pada Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tema Lokus	Kabupaten	Kawasan
1.	Distribusi Lokus Prioritas 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	Barito Kuala	Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan
		Banjarnegara	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan
2.	Distribusi Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	Hulu Sungai Selatan	Kawasan Perdesaan Sentra Industri Makanan Ringan

Sumber : Dokumen Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 s/d 2024

Adapun isu strategis selanjutnya dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

- b. Masih rendahnya kapasitas aparaturn pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat
- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Masih lemahnya koodinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa
- f. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa
- g. Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi desa swasembada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD Provinsi

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Konsep Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan nasional antara lain optimalisasi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II, rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, rencana pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dan kecenderungan peralihan dari ekonomi ekstraktif menuju non ekstraktif serta potensi pengembangan sektor kelautan dan pariwisata. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi melingkupi pemenuhan kebutuhan mobilitas, infrastruktur untuk ekonomi yang terintegrasi serta mewujudkan lingkungan wilayah yang sehat, cerdas dan efisien.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sendiri merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan yang berkelanjutan telah dijadikan dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni:

- a. Prinsip saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem;
- b. Prinsip keseimbangan yakni keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup/ekologi;
- c. Prinsip keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah

Pada laporan KLHS RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran dalam rekomendasi skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rekomendasi Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Upaya Tambahan

Target Tujuan Berkelanjutan	Isu Strategis	Rekomendasi 2021-2026
Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Masih adanya desa tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan PAD Desa, - Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, - Peningkatan Kapasitas SDM dan Aparatur Desa, - Peningkatan Kualitas Data Pembangunan Desa

Selanjutnya implikasi dari keberadaan RTRW dan KLHS terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pemangku kebijakan dapat digambarkan pada sebagai berikut:

Tabel 3.7 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No.	Telaahan	Permasalahan Dinas PMD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Implikasi RTRW	Perlunya Dinas PMD Provinsi Kalsel melakukan pembinaan terkait penggunaan RTRW sebagai dasar perencanaan desa	Dokumen RTRW masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kegiatan-kegiatan pendukung di Dinas PMD untuk melakukan pembinaan dalam mendorong pemanfaatan dokumen RTRW oleh desa
2.	Implikasi KLHS	Masih adanya desa tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pencapaian target desa tertinggal yang telah ditetapkan setiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi dasar penghitungan bagi pencapaian kinerja - Kenaikan status desa tertinggal menjadi desa berkembang menjadi indikator kinerja utama

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga Pusat dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD dapat disimpulkan isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Isu Strategis	Masalah Pokok
Rendahnya tingkat perkembangan desa	Rendahnya penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa
	Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan
	Kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE
Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan pada pembangunan desa	Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
	Belum optimalnya sinergisitas lintas sektor dalam layanan sosial dasar
Rendahnya Kapasitas Perekonomian Masyarakat Desa	Belum optimalnya revitalisasi BUMDesa
	Rendahnya pengelolaan pasar desa
	Rendahnya pembentukan jaringan kemitraan ekonomi desa
Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan	Rendahnya pengelolaan keberlanjutan lingkungan perdesaan berwawasan lingkungan
	Rendahnya pengembangan kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Demi mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni:

4.1.1. Menurunnya status desa tertinggal

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang sebagai berikut :

Permasalahan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal	223	125	30	38	30	0	0

4.1.2. Meningkatnya status desa menjadi mandiri

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan status desa maju menjadi desa mandiri sebagai berikut :

Permasalahan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Belum semua desa menjadi desa mandiri	6	28	38	48	58	68	78



TABEL T-C 25
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TUJUAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Menurunnya status Desa Tertinggal	Rendahnya tingkat perkembangan desa	Meningkatnya desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	14%	14%	-	-	-	-
			Meningkatnya kepuasan atas pelayanan Pemerintahan Desa	-	-	62	64	66	68
2. Meningkatnya status desa menjadi Desa Mandiri	Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan pada pembangunan desa	Meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa	0,75	0,76	0,78	0,79	0,81	0,83
Indeks Ketahanan Sosial			0,58	0,60	0,61	0,62	0,64	0,65	
Indeks Ketahanan Ekonomi			0,68	0,69	0,77	0,78	0,79	0,80	
Indeks Ketahanan Lingkungan									
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rendahnya kapasitas perekonomian desa	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekonomi						
	Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan						

TUJUAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 poin	80 poin	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin



Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

1. Indeks Ketahanan Sosial, dilengkapi dengan data pada bagian kesehatan yang terdiri dari data ketersediaan sarana kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, apotik, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan tenaga kesehatan dokter, ketersediaan tenaga kesehatan lainnya, akses ke poskesdes/ polindes dan posyandu, tingkat kepesertaan BPJS/JKN/KIS, derajat kesehatan dan gizi buruk, sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pengukuran tikar pertumbuhan usia anak 0 – 23 bulan, dan kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 1000 HPK. Pada bagian pendidikan, dilengkapi dengan data terkait akses ke pendidikan dasar dan menengah, data tingkat pendidikan, akses ke pendidikan non-formal usia 3 – 5 tahun, dan akses pengetahuan, modal sosial, keamanan warga, kesejahteraan sosial. Pada bagian permukiman, dilengkapi dengan data terkait akses air bersih dan air minum, akses sanitasi, akses listrik, dan akses informasi dan komunikasi. Indeks Ketahanan Sosial didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan;



- b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan keberdayaan kesehatan;
 - c. Jumlah desa yang memiliki peningkatan solidaritas sosial;
 - d. Jumlah desa yang memiliki peningkatan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi, dilengkapi dengan data terkait keragaman produksi masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Indeks Ketahanan Ekonomi didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan lembaga ekonomi desa;
 - b. Jumlah desa yang mengalami peningkatan keragaman produksi masyarakat desa.
3. Indeks Ketahanan Lingkungan, dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan dan potensi bencana. Indeks Ketahanan Lingkungan didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sarana prasarana desa dan kawasan perdesaan;
 - b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sumber daya alam.

Indeks Desa Membangun selain Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan perlu dilengkapi pula dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui dua sasaran yakni meningkatnya desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik kemudian pada tahun 2023 dilanjutkan oleh peningkatan kepuasan pelayanan pemerintahan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik;
- b. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antardesa;
- c. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi keuangan dan asset desa dengan baik;
- d. Jumlah desa yang berprestasi;
- e. Jumlah desa yang memiliki profil paling terbaru.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang kemudian dipertegas dengan keberadaan arah kebijakan.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel tentunya harus sejalan dengan tema pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

2022	2023	2024	2025	2026
Memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan lingkungan	Penguatan daya saing SDM untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan	Peningkatan kualitas daya saing daerah untuk mendukung sektor utama yang sinergi dengan kebijakan nasional	Pemantapan kualitas daya saing daerah menuju kemandirian melalui intensitas kerjasama yang mendukung pembangunan	Mewujudkan kemandirian daerah menuju Kalimantan Selatan yang makmur dan sejahtera

Tema Pembangunan ini menjadi dasar bagi arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

2022	2023	2024	2025	2026
Menguatkan pijakan menuntaskan Pandemi COVID-19 dengan perkuatan SDM (khususnya kesehatan masyarakat) dan mulai peningkatan perekonomian skala besar	Peningkatan kualitas SDM (seluruh aspek) dalam mendukung perekonomian yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	Peningkatan kualitas SDM dan prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan daerah dan kebijakan nasional yang dilaksanakan di Kalsel	Pengembangan kualitas SDM dan prasarana wilayah mendukung perekonomian berkelanjutan berpedoman pada pencapaian Pembangunan Global (SDGs)	Memantapkan kualitas SDM dan prasarana wilayah menuju Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)

Keselarasan Visi, Misi RPJMD 2021-2026 Kalimantan Selatan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tergambar dalam tabel berikut:

Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel

VISI : “Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”			
MISI 2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata			
TUJUAN: Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan			
SASARAN: Meningkatnya Pendapatan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatnya status Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang</p> <p>2. Meningkatnya status Desa Maju menjadi Desa Mandiri</p>	<p>1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi</p>	<p>a. Meningkatkan kapasitas perekonomian lembaga dan masyarakat desa</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) baik dari segi permodalan maupun SDM</p> <p>2. Pengembangan pasar desa</p> <p>3. Pengembangan produk unggulan desa</p> <p>4. Pengembangan kawasan ekonomi perdesaan</p> <p>5. Pembinaan terhadap Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Nasional di Provinsi Kalsel pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala



			- Kawasan Perdesaan Agro Minapolitan Kabupaten Banjar
MISI 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik			
TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			
SASARAN: Meningkatnya Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunnya status desa tertinggal 2. Meningkatnya status desa menjadi desa mandiri	1. Meningkatnya desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan Pemerintahan Desa	a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa	1. Penataan desa 2. Peningkatan pelayanan pemerintahan desa 3. Fasilitasi penyusunan peraturan kabupaten terkait desa 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 5. Fasilitasi produk hukum desa 6. Fasilitasi keuangan dan aset desa 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 8. Peningkatan pengembangan desa 9. Fasilitasi inovasi desa
	1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial	a. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan di desa	1. Peningkatan kapasitas lembaga adat



			2. Peningkatan kapasitas LPM 3. Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
MISI 5 Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana			
TUJUAN: Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
SASARAN: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya status Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang 2. Meningkatnya status Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan	a. Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan b. Meningkatkan upaya pemulihan SDA di desa c. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Peningkatan sarana prasarana perdesaan 2. Peningkatan kawasan perdesaan di kabupaten/kota 3. Peningkatan kapasitas peran kelompok masyarakat desa dalam pemulihan SDA 4. Peningkatan kapasitas Posyantek terkait Teknologi Tepat Guna



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusunlah rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 2021-2026 sebagai berikut:

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
						14%													
		Presentase Kenaikan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun																	
		Nilai SAKIP Dinas PMD		A											A				
		Persentase Penatausahaan Keuangan dan Aset		80%											0%				
		Persentase Pelayanan Umum dan Kepegawalan		80%											0%				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Rp 23.097.000.796															
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Rp 23.097.000.796											Rp 23.097.000.796				
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	Rp 11.223.425.296										0%	Rp 11.223.425.296			
2	13	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp 510.000.000									100%	Rp 510.000.000			
2	13	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp 510.000.000									6	laporan	Rp 510.000.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.02	Administrasi Keuangan	100%	Rp 5.797.155.996									100%	Rp 5.797.155.996			
2	13	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 5.496.537.996									12	bulan	Rp 5.496.537.996	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp 157.200.000									12	bulan	Rp 157.200.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp 143.418.000									12	bulan	Rp 143.418.000	Dinas PMD	SKPD



2	13	01	1.05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	Rp	25.050.000										100%	Rp	25.050.000				
2	13	01	1.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakalan kerja yang diadakan	buah	Rp	25.050.000										82	buah	Rp	25.050.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	Rp	2.531.503.400											100%	Rp	2.531.503.400			
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan komponen instalasi listrik penerangan kantor	bulan	Rp	29.966.800										12	bulan	Rp	29.966.800	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	Rp	80.360.400										12	bulan	Rp	80.360.400	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	Rp	325.906.400										12	bulan	Rp	325.906.400	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan berjalannya kegiatan cetakan dan penggandaan	bulan	Rp	39.999.800										12	bulan	Rp	39.999.800	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan	bulan	Rp	18.700.000										12	bulan	Rp	18.700.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan berjalannya kegiatan fasilitas kunjungan tamu	bulan	Rp	982.035.000										12	bulan	Rp	982.035.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	Rp	982.035.000										12	bulan	Rp	982.035.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan berjalannya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	bulan	Rp	72.500.000										12	bulan	Rp	72.500.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	Rp	265.249.900											100%	Rp	265.249.900			
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	buah	Rp	265.249.900										50	buah	Rp	265.249.900	Dinas PMD	SKPD



2	13	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	Rp	1.252.000.000										100%	Rp	1.252.000.000				
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah berjalannya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	Rp	252.000.000										12	bulan	Rp	252.000.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	Rp	1.000.000.000										12	bulan	Rp	1.000.000.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	Rp	842.466.000										100%	Rp	842.466.000			
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan kendaraan dinas	bulan	Rp	614.870.000										12	bulan	Rp	614.870.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan berjalannya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	Rp	123.680.000										12	bulan	Rp	123.680.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	bulan	Rp	103.916.000										12	bulan	Rp	103.916.000	Dinas PMD	SKPD
						Persentase perkembangan desa yang baik	14%	Rp	272.188.000										14%					
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kenaikan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	14%	Rp	272.188.000										14%	Rp	272.188.000			
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase perkembangan desa yang baik	14%	Rp	272.188.000										14%	Rp	272.188.000			
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah aparat desa yang mengetahui pelaksanaan penataan desa	orang	Rp	272.188.000										44	orang	Rp	272.188.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota



					Persentase desa dengan sarana prasarana kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa	14%	Rp	1.644.559.800											14%							
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kenaikan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	14%	Rp	1.644.559.800											14%	Rp	1.644.559.800				
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase desa dengan sarana prasarana kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa	14%	Rp	1.644.559.800											14%	Rp	1.644.559.800				
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang mampu mengidentifikasi potensi desa yang dikerjasamakan.	orang	Rp	199.076.000											55	orang	Rp	199.076.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana prasarana perdesaan yang dibangun dan diperbaiki	unit	Rp	1.445.483.800											23	unit	Rp	1.445.483.800	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
						Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	14%	Rp	4.099.789.300											14%						
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kenaikan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	14%	Rp	4.099.789.300											14%	Rp	4.099.789.300				
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	14%	Rp	4.099.789.300											14%	Rp	4.099.789.300				
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mampu mengelola administrasi pemerintah desa	orang	Rp	273.140.400											44	orang	Rp	273.140.400	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur desa yang mampu mengelola administrasi pemerintah desa	orang	Rp	205.143.400											55	orang	Rp	205.143.400	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang terampil dalam Sistem Keuangan Desa	orang	Rp	203.806.000											33	orang	Rp	203.806.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa dengan penginventarisasian aset sesuai dengan regulasi	desa	Rp	180.764.000											33	desa	Rp	180.764.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang berprestasi	desa	Rp	680.806.900											6	desa	Rp	680.806.900	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
						Jumlah kelurahan yang berprestasi	kelurahan													6	kelurahan					
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang memiliki profil paling terbaru	desa	Rp	194.007.900											50	desa	Rp	194.007.900	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Peraturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDESA yang maju	buah	Rp	2.442.841.600											50	buah	Rp	2.442.841.600	Dinas PMD	13 Kab/Kota	
						Jumlah Pasar Desa yang aktif	buah													50	buah					



					Persentase kenaikan status desa terintegrasi menjadi desa berkembang				29%															
					Persentase kenaikan status desa maju menjadi desa mandiri				0,54%															
					Nilai SAKIP Dinas PMD				A									A						
					Persentase Pentausahaan Keuangan dan Aspek				80%									0%						
					Persentase Pelayanan Umum dan Kepegawaian				80%									0%						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp	23.483.766.992													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBEDIAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					Rp	10.140.455.192								Rp	23.483.766.992				
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100%	Rp	10.140.455.192							100%	Rp	10.140.455.192			
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	Rp	310.490.500							100%	Rp	310.490.500			
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	dokumen	Rp	120.597.500						2	dokumen	Rp	120.597.500	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12	laporan	Rp	138.790.100						12	laporan	Rp	138.790.100	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2	dokumen	Rp	51.102.900						2	dokumen	Rp	51.102.900	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	Rp	6.358.295.292							100%	Rp	6.358.295.292			
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	Rp	6.088.403.292						12	bulan	Rp	6.088.403.292	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	bulan	Rp	149.400.000						12	bulan	Rp	149.400.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	laporan	Rp	120.492.000						1	laporan	Rp	120.492.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					100%	Rp	82.782.000							100%	Rp	82.782.000			
2	13	01	1.05	02	Pengadaan Pakikan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					86	buah	Rp	26.100.000						86	buah	Rp	26.100.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2	kegiatan	Rp	56.682.000						2	kegiatan	Rp	56.682.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	Rp	1.216.626.400							100%	Rp	1.216.626.400			
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor					12	bulan	Rp	20.033.900						12	bulan	Rp	20.033.900	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	bulan	Rp	80.359.300						12	bulan	Rp	80.359.300	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12	bulan	Rp	325.906.400						12	bulan	Rp	325.906.400	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12	bulan	Rp	39.999.800						12	bulan	Rp	39.999.800	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	bulan	Rp	17.100.000						12	bulan	Rp	17.100.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu					0	bulan	Rp	-						0	bulan	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	bulan	Rp	694.227.000						12	bulan	Rp	694.227.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12	bulan	Rp	34.000.000						12	bulan	Rp	34.000.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12	bulan	Rp	5.000.000						12	bulan	Rp	5.000.000	Dinas PMD	SKPD



2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp	95.248.000							100%	Rp	95.248.000			
2	13	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang tersedia			0	buah	Rp	-						0	buah	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia			8	buah	Rp	42.500.000						8	buah	Rp	42.500.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia			3	buah	Rp	52.748.000						3	buah	Rp	52.748.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	Rp	938.323.000							100%	Rp	938.323.000			
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah berjalannya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	bulan	Rp	228.000.000						12	bulan	Rp	228.000.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor			12	bulan	Rp	710.323.000						12	bulan	Rp	710.323.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	Rp	1.138.690.000							100%	Rp	1.138.690.000			
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan berjalannya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan kendaraan dinas			12	bulan	Rp	615.890.000						12	bulan	Rp	615.890.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan berjalannya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			12	bulan	Rp	122.800.000						12	bulan	Rp	122.800.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	01	1.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi			12	bulan	Rp	400.000.000						12	bulan	Rp	400.000.000	Dinas PMD	SKPD
						Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			14%									14%					
						Indeks Ketahanan Sosial			0,76									0,76					
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik			14%									14%					
						Indeks Ketahanan Sosial			0,76									0,76					
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah desa dengan dengan tata kelola pemerintahan yang baik			40	desa	Rp	117.528.000						40	desa	Rp	117.528.000		
						Jumlah desa dengan indeks ketahanan sosial yang meningkat																	
2	13	02	1.01	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah desa yang didentifikasi, inventarisasi dan fasilitasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat			0	desa	Rp	-						0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah desa yang difasilitasi kelembagaan desa			0	desa	Rp	-						0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD



2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan penataan desa sesuai regulasi			44	desa	Rp	117.528.000							44	desa	Rp	117.528.000	Dinas PMD	SKPD	
2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyediakan prasarana dan pelayanan pemerintahan desa			0	desa	Rp	-							0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD	
						Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			14%										14%						
						Indeks Ketahanan Ekonomi			0,69										0,60						
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Indeks Ketahanan Ekonomi			0,69			Rp	8.334.361.700						0,60			Rp	8.334.361.700		
						Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik			14%										14%						
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah desa dengan indeks ketahanan lingkungan yang meningkat			40	desa	Rp	8.334.361.700							40	desa	Rp	8.334.361.700			
						Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik																			
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			52	desa	Rp	94.332.800							52	desa	Rp	94.332.800	Dinas PMD	SKPD	
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama desa yang difasilitasi dengan pihak ketiga			3	buah	Rp	242.685.000							3	buah	Rp	242.685.000	Dinas PMD	SKPD	
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun			3	buah	Rp	7.997.343.900							3	buah	Rp	7.997.343.900	Dinas PMD	SKPD	
						Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			14%										14%						
						Indeks Ketahanan Ekonomi			0,60										0,60						
						Indeks Ketahanan Sosial			0,76										0,76						
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Ketahanan Sosial			0,76										0,76						
						Indeks Ketahanan Ekonomi			0,60			Rp	1.744.878.600						0,60			Rp	1.744.878.600		
						Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik			14%										14%						
2	13	4	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan indeks ketahanan sosial yang meningkat			40	desa	Rp	1.744.878.600							40	desa	Rp	1.744.878.600			
						Jumlah desa dengan indeks ketahanan ekonomi yang meningkat																			
						Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik																			



2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan penyusunan peraturan daerah yang mengatur desa	0	kabupaten	Rp	-									0	kabupaten	Rp	-	Dinas PMD	SKPD	
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina terkait manajemen desa	33	desa	Rp	151.936.700										33	desa	Rp	151.936.700	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait produk hukum desa	52	desa	Rp	94.332.800										52	desa	Rp	94.332.800	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait pengelolaan keuangan desa	33	desa	Rp	140.619.000										33	desa	Rp	140.619.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait pengelolaan aset desa	33	desa	Rp	153.052.000										33	desa	Rp	153.052.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang berprestasi	6	desa	Rp	377.018.000										6	desa	Rp	377.018.000	Dinas PMD	SKPD
						Jumlah kelurahan yang berprestasi	6	kelurahan	Rp	-										6	kelurahan	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi terkait pelaksanaan profil desa dan kelurahan	21	desa	Rp	147.720.900										21	desa	Rp	147.720.900	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa dengan aparat pemerintah desa yang dibina	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang dibina terkait peningkatan kapasitas anggota BPD	30	desa	Rp	74.981.200										30	desa	Rp	74.981.200	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah desa yang dibina terkait percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	55	desa	Rp	56.384.000										55	desa	Rp	56.384.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang melaksanakan penugasan urusan/kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Kabupaten yang dibina dan diawasi atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11	kabupaten	Rp	56.304.000										11	kabupaten	Rp	56.304.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang Maju	40	buah	Rp	436.339.000										40	buah	Rp	436.339.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait penetapan dan penegasan batas desa	40	desa	Rp	56.191.000										40	desa	Rp	56.191.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait pembinaan laporan kepala desa	0	laporan	Rp	-										0	laporan	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten yang difasilitasi terkait pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa	0	kabupaten	Rp	-										0	kabupaten	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait pengembangan inovasi desa	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait pekan inovasi perkembangan desa	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
2	13	04	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten yang difasilitasi terkait penetapan kewenangan desa	0	desa	Rp	-										0	desa	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
						Indeks Ketahanan Sosial				0,76												0,76			
						Indeks Ketahanan Ekonomi				0,60													0,60		
						Indeks Ketahanan Lingkungan				0,69													0,69		



2	13	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Ketahanan Sosial	0,76	Rp	3.146.543.500											0,76	Rp	3.146.543.500				
					Indeks Ketahanan Ekonomi	0,60													0,60						
					Indeks Ketahanan Lingkungan	0,69													0,69						
2	13	05	1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dengan Indeks ketahanan sosial yang meningkat	40 desa	Rp	3.146.543.500											40 desa	Rp	3.146.543.500				
					Jumlah desa dengan Indeks ketahanan ekonomi yang meningkat																				
					Jumlah desa dengan Indeks ketahanan lingkungan yang meningkat																				
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	10 buah	Rp	291.106.500											10 buah	Rp	291.106.500	Dinas PMD	SKPD	
2	13	05	1.01	02	fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang difasilitasi terkait penataan, pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	257 desa	Rp	807.700.000											257 desa	Rp	807.700.000	Dinas PMD	SKPD	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	40 buah	Rp	450.167.300											40 buah	Rp	450.167.300	Dinas PMD	SKPD	
2	13	05	1.01	04	fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa terkait penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	0 desa	Rp												0 desa	Rp		Dinas PMD	SKPD	
2	13	05	1.01	05	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	50 desa	Rp	193.512.000												50 desa	Rp	193.512.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	05	1.01	06	fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang difasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40 buah	Rp	792.914.000												40 buah	Rp	792.914.000	Dinas PMD	SKPD
2	13	05	1.01	07	fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong masyarakat	0 kabupaten/kota	Rp													0 kabupaten/kota	Rp		Dinas PMD	SKPD
2	13	05	1.01	08	fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa	10 desa	Rp	206.126.800												10 desa	Rp	206.126.800	Dinas PMD	SKPD
2	13	05	1.01	09	fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	13 buah	Rp	405.016.900												13 buah	Rp	405.016.900	Dinas PMD	SKPD



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
1. Menurunkan Status Desa Tertinggal			Persentase kenaikan status desa tertinggal menjadi desa berkembang															
2. Meningkatkan Status Desa Mandiri			Persentase kenaikan status desa maju menjadi desa mandiri															
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD		Nilai SAKIP Dinas PMD Provinsi Kalsel				80		80		80		80		80			
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan				80%		80%		80%		80%		80%			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												Rp 10.963.099.517				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100%	Rp 10.560.047.836	100%	Rp 11.094.597.457	100%	Rp 10.839.421.716	100%	Rp 10.963.099.517	100%	Rp 43.457.166.526		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				100%	Rp 390.047.836	100%	Rp 570.000.000	100%	Rp 450.000.000	100%	Rp 450.000.000	100%	Rp 1.860.047.836		
		Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2	dokumen Rp 120.000.000	2	dokumen Rp 220.000.000	2	dokumen Rp 150.000.000	2	dokumen Rp 150.000.000	8	dokumen Rp 640.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi pengusunan dokumen RKA-SKPD				1	laporan Rp -	1	laporan Rp -	1	laporan Rp -	1	laporan Rp -	4	laporan Rp -	Dinas PMD	SKPD



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					12 laporan	Rp	150.000.000	12 laporan	Rp	150.000.000	12 laporan	Rp	150.000.000	12 laporan	Rp	150.000.000	48 laporan	Rp	600.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah					2 laporan	Rp	120.047.836	2 laporan	Rp	200.000.000	2 laporan	Rp	150.000.000	2 laporan	Rp	150.000.000	8 laporan	Rp	620.047.836	Dinas PMD	SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya kegiatan administrasi keuangan					100%	Rp 6.730.000.000	100%	Rp 6.730.000.000	100%	Rp 6.744.824.259	100%	Rp 6.744.824.259	100%	Rp 6.744.824.259	100%	Rp 26.949.648.518					
		Pengediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					34 orang/bulan	Rp	6.500.000.000	34 orang/bulan	Rp	6.500.000.000	34 orang/bulan	Rp	6.500.000.000	34 orang/bulan	Rp	6.500.000.000	136 orang/bulan	Rp	26.000.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pengediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pengediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					12 dokumen	Rp	150.000.000	12 dokumen	Rp	150.000.000	12 dokumen	Rp	150.000.000	12 dokumen	Rp	150.000.000	48 dokumen	Rp	600.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					12 dokumen	Rp	-	12 dokumen	Rp	-	12 dokumen	Rp	-	12 dokumen	Rp	-	48 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD					1 laporan	Rp	80.000.000	1 laporan	Rp	80.000.000	1 laporan	Rp	94.824.259	1 laporan	Rp	94.824.259	4 laporan	Rp	349.648.518	Dinas PMD	SKPD



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan'	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Koordinasi dan Penjusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penjusunan laporan keuangan					2 laporan	Rp	-	2 laporan	Rp	-	2 laporan	Rp	-	2 laporan	Rp	-	8 laporan	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Penjusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tercapainya kegiatan administrasi barang milik daerah					100%	Rp	-	100%	Rp 50.000.000	-	100%	Rp 50.000.000	-	100%	Rp 50.000.000	-	100%	Rp 150.000.000	-		
		Penjusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1 laporan	Rp	-	1 laporan	Rp 50.000.000	-	1 laporan	Rp 50.000.000	-	1 laporan	Rp 50.000.000	-	4 laporan	Rp 150.000.000	-	Dinas PMD	SKPD
		Rekonsiliasi dan Penjusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penjusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 laporan	Rp	-	1 laporan	Rp	-	1 laporan	Rp	-	1 laporan	Rp	-	4 laporan	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 laporan	Rp	-	1 laporan	Rp	-	1 laporan	Rp	-	1 laporan	Rp	-	4 laporan	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian					100%	Rp 80.000.000	-	100%	Rp 80.000.000	-	100%	Rp 80.000.000	-	100%	Rp 80.000.000	-	100%	Rp 320.000.000	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					80 paket	Rp 30.000.000	-	80 paket	Rp 30.000.000	-	80 paket	Rp 30.000.000	-	80 paket	Rp 30.000.000	-	320 paket	Rp 120.000.000	-	Dinas PMD	SKPD
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	-	4 dokumen	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					34 orang	Rp	50.000.000	20 orang	Rp	50.000.000	34 orang	Rp	50.000.000	34 orang	Rp	50.000.000	122 orang	Rp	200.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					34 orang	Rp	-	34 orang	Rp	-	34 orang	Rp	-	34 orang	Rp	-	136 orang	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					34 orang	Rp	-	34 orang	Rp	-	34 orang	Rp	-	34 orang	Rp	-	136 orang	Rp	-	Dinas PMD	SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya kegiatan administrasi umum perangkat daerah					100%	Rp 1.200.000.000	100%	Rp 1.324.597.457	100%	Rp 1.304.597.457	100%	Rp 1.428.275.258	100%	Rp 5.257.470.172							
		Pengediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 paket	Rp	20.000.000	12 paket	Rp	20.000.000	12 paket	Rp	20.000.000	12 paket	Rp	20.000.000	48 paket	Rp	80.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pengediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 paket	Rp	50.000.000	12 paket	Rp	100.000.000	12 paket	Rp	90.000.000	12 paket	Rp	90.000.000	48 paket	Rp	330.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pengediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 paket	Rp	330.000.000	12 paket	Rp	330.000.000	12 paket	Rp	330.000.000	12 paket	Rp	330.000.000	48 paket	Rp	1.320.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pengediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 paket	Rp	20.000.000	12 paket	Rp	20.000.000	12 paket	Rp	20.000.000	12 paket	Rp	20.000.000	48 paket	Rp	80.000.000	Dinas PMD	SKPD



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		Pengediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 dokumen	Rp 10.000.000	12 dokumen	Rp 10.000.000	12 dokumen	Rp 10.000.000	12 dokumen	Rp 10.000.000	48 dokumen	Rp 40.000.000	Dinas PMD	SKPD		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp 20.000.000	1 laporan	Rp 10.000.000	1 laporan	Rp 10.000.000	4 laporan	Rp 40.000.000	Dinas PMD	SKPD		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 laporan	Rp 750.000.000	1 laporan	Rp 804.537.457	1 laporan	Rp 804.537.457	1 laporan	Rp 928.275.258	4 laporan	Rp 3.287.470.172	Dinas PMD	SKPD		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dokumen	Rp 20.000.000	1 dokumen	Rp 20.000.000	1 dokumen	Rp 20.000.000	1 dokumen	Rp 20.000.000	4 dokumen	Rp 80.000.000	Dinas PMD	SKPD		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD	SKPD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercapainya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 460.000.000	100%	Rp 360.000.000	100%	Rp 360.000.000	100%	Rp 1.490.000.000				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4 unit	Rp 200.000.000	4 unit	Rp 200.000.000	4 unit	Rp 200.000.000	4 unit	Rp 200.000.000	16 unit	Rp 800.000.000	Dinas PMD	SKPD		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 paket	Rp 50.000.000	1 paket	Rp 200.000.000	1 paket	Rp 100.000.000	1 paket	Rp 100.000.000	6 paket	Rp 450.000.000	Dinas PMD	SKPD		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			50 unit	Rp 60.000.000	50 unit	Rp 60.000.000	50 unit	Rp 60.000.000	50 unit	Rp 60.000.000	200 unit	Rp 240.000.000	Dinas PMD	SKPD		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit	Rp -	1 unit	Rp -	1 unit	Rp -	1 unit	Rp -	4 unit	Rp -	Dinas PMD	SKPD		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit	Rp -	unit	Rp -	unit	Rp -	unit	Rp -	1 unit	Rp -	Dinas PMD	SKPD		



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya kegiatan pengediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100%	Rp 930.000.000	100%	Rp 1.020.000.000	100%	Rp 930.000.000	100%	Rp 930.000.000	100%	Rp 3.990.000.000		
		Pengediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Surat Menyurat					1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp 20.000.000	1 bulan	Rp 10.000.000	1 laporan	Rp 10.000.000	4 laporan	Rp 40.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 laporan	Rp 240.000.000	12 laporan	Rp 240.000.000	12 bulan	Rp 240.000.000	12 laporan	Rp 240.000.000	48 laporan	Rp 960.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pengediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp 30.000.000	1 bulan	Rp -	1 laporan	Rp -	4 laporan	Rp 30.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 laporan	Rp 750.000.000	1 laporan	Rp 750.000.000	1 bulan	Rp 750.000.000	1 laporan	Rp 750.000.000	4 laporan	Rp 3.000.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					100%	Rp 860.000.000	100%	Rp 860.000.000	100%	Rp 860.000.000	100%	Rp 860.000.000	100%	Rp 3.440.000.000		
		Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					21 unit	Rp 500.000.000	21 unit	Rp 500.000.000	21 unit	Rp 500.000.000	21 unit	Rp 500.000.000	84 unit	Rp 2.000.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					12 unit	Rp 30.000.000	12 unit	Rp 30.000.000	12 unit	Rp 30.000.000	12 unit	Rp 30.000.000	48 unit	Rp 120.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					165 unit	Rp 130.000.000	165 unit	Rp 130.000.000	165 unit	Rp 130.000.000	165 unit	Rp 130.000.000	660 unit	Rp 520.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 unit	Rp 200.000.000	3 unit	Rp 200.000.000	3 unit	Rp 200.000.000	3 unit	Rp 200.000.000	12 unit	Rp 800.000.000	Dinas PMD	SKPD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 unit	Rp -	3 unit	Rp -	3 unit	Rp -	3 unit	Rp -	12 unit	Rp -	Dinas PMD	SKPD



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
	Meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial		Indeks Ketahanan Sosial					0,78		0,79		0,81		0,83		0,83			
		PROGRAM PENATAAN DESA	Indeks Ketahanan Sosial					0,78	Rp 160.529.610	0,79	Rp 168.655.619	0,81	Rp 164.776.539	0,83	Rp 166.656.640	0,83	Rp 660.618.408		
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa dengan indeks ketahanan sosial yang meningkat					40 desa	Rp 160.529.610	40 desa	Rp 168.655.619	40 desa	Rp 164.776.539	40 desa	Rp 166.656.640	160 desa	Rp 660.618.408		
		Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kelembagaan desa dan desa adat					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan desa					4 dokumen	Rp 160.529.610	4 dokumen	Rp 168.655.619	4 dokumen	Rp 164.776.539	4 dokumen	Rp 166.656.640	16 dokumen	Rp 660.618.408	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Pengediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (utk TMMMD)	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa					2 unit	Rp -	2 unit	Rp -	2 unit	Rp -	2 unit	Rp -	8 unit	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
	Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi		Indeks Ketahanan Ekonomi					0,61		0,62		0,64		0,65		0,65			
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Indeks Ketahanan Ekonomi					0,61	Rp 8.379.871.948	0,62	Rp 8.897.190.066	0,64	Rp 1.365.054.695	0,65	Rp 1.380.629.969	0,65	Rp 20.022.746.678		
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi yang meningkat					40 desa	Rp 8.379.871.948	40 desa	Rp 8.897.190.066	40 desa	Rp 1.365.054.695	40 desa	Rp 1.380.629.969	200 desa	Rp 8.300.000.000		
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa lintas kabupaten/kota					1 dokumen	Rp 300.000.000	1 dokumen	Rp 350.000.000	1 dokumen	Rp 300.000.000	1 dokumen	Rp 350.000.000	4 dokumen	Rp 1.300.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah dokumen kerjasama yang dilaksanakan					1 dokumen	Rp 550.000.000	1 dokumen	Rp 550.000.000	1 dokumen	Rp 465.054.695	1 dokumen	Rp 380.629.969	4 dokumen	Rp 1.945.684.664	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan					9 dokumen	Rp 7.523.871.948	9 dokumen	Rp 7.997.190.066	9 dokumen	Rp 600.000.000	9 dokumen	Rp 650.000.000	36 dokumen	Rp 16.777.062.014	Dinas PMD	13 Kab/Kota



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelanggan		Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa					62		64		66		68		68		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa					62	Rp 2.133.600.029	64	Rp 2.241.602.862	66	Rp 2.190.045.996	68	Rp 2.215.034.421	68	Rp 8.780.283.308	
			Jumlah desa dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa					40 desa		40 desa		40 desa		40 desa		160 desa		
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang					20 desa		20 desa		20 desa		20 desa		80 desa		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju					5 desa	Rp 2.133.600.029	5 desa	Rp 2.241.602.862	5 desa	Rp 2.190.045.996	5 desa	Rp 2.215.034.421	20 desa	Rp 8.780.283.308	
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) berkembang					10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		40 desa		
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Maju					1 desa		1 desa		1 desa		1 desa		4 desa		
		Fasilitasi Pengusulan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengusulan peraturan daerah kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur desa					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD 13 Kab/Kota
		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan manajemen pemerintahan desa					1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	4 dokumen	Rp 400.000.000	Dinas PMD 13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pengusulan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen produk hukum desa yang ditetapkan					1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	4 dokumen	Rp 400.000.000	Dinas PMD 13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pengusulan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengusulan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD 13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa					3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	12 dokumen	Rp 400.000.000	Dinas PMD 13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa					3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 158.002.833	3 dokumen	Rp 106.445.967	3 dokumen	Rp 131.434.392	12 dokumen	Rp 436.883.192	Dinas PMD 13 Kab/Kota



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang mengikuti pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa					150 orang	Rp 130.000.000	150 orang	Rp 130.000.000	150 orang	Rp 130.000.000	150 orang	Rp 130.000.000	600 orang	Rp 520.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan					4 dokumen	Rp 400.000.000	4 dokumen	Rp 400.000.000	4 dokumen	Rp 400.000.000	4 dokumen	Rp 400.000.000	16 dokumen	Rp 1.600.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan					1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 150.000.000	4 dokumen	Rp 600.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina					50 orang	Rp -	50 orang	Rp -	50 orang	Rp -	50 orang	Rp -	200 orang	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD					88 orang	Rp 100.000.000	88 orang	Rp 100.000.000	88 orang	Rp 100.000.000	88 orang	Rp 100.000.000	352 orang	Rp 400.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis					2 dokumen	Rp 100.000.000	2 dokumen	Rp 100.000.000	2 dokumen	Rp 100.000.000	2 dokumen	Rp 100.000.000	8 dokumen	Rp 400.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen hasil penugasan urusan/kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa					3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	12 dokumen	Rp 400.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa					1 dokumen	Rp 450.000.000	1 dokumen	Rp 450.000.000	1 dokumen	Rp 450.000.000	1 dokumen	Rp 450.000.000	4 dokumen	Rp 1.800.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa					1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000	4 dokumen	Rp 400.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan laporan kepala desa					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa di kabupaten/kota					11 dokumen	Rp 103.600.029	11 dokumen	Rp 103.600.029	11 dokumen	Rp 103.600.029	11 dokumen	Rp 103.600.029	44 dokumen	Rp 414.400.116	Dinas PMD	13 Kab/Kota

Page 12



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah desa yang melakukan pengembangan inovasi					10 desa	Rp 100.000.000	10 desa	Rp 150.000.000	10 desa	Rp 150.000.000	10 desa	Rp 150.000.000	40 desa	Rp 550.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekan inovasi perkembangan desa					1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp -	4 laporan	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penetapan kewenangan desa dan desa adat di kabupaten/kota					1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp -	Dinas PMD	13 Kab/Kota
	Meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan		Indeks Ketahanan Lingkungan					0,77		0,78		0,79		0,80		0,80			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Ketahanan Lingkungan					0,77	Rp 3.240.173.282	0,78	Rp 3.391.484.854	0,79	Rp 7.123.780.702	0,80	Rp 7.205.063.040	0,80	Rp 20.960.501.878		
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dengan indeks ketahanan lingkungan yang meningkat					40 desa	Rp 3.240.173.282	40 desa	Rp 3.391.484.854	40 desa	Rp 7.123.780.702	40 desa	Rp 7.205.063.040	160 desa	Rp 20.960.501.878		
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat					1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 200.000.000	dokumen	Rp 400.000.000	dokumen	Rp 400.000.000	2 dokumen	Rp 1.200.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga masyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat					2 dokumen	Rp 323.004.082	2 dokumen	Rp 400.000.000	dokumen	Rp 823.780.702	dokumen	Rp 905.063.040	4 dokumen	Rp 2.457.847.824	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga masyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya					183 lembaga	Rp 250.000.000	183 lembaga	Rp 250.000.000	lembaga	Rp 500.000.000	lembaga	Rp 500.000.000	366 lembaga	Rp 1.500.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota

Activate Windows



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan'	Rencana Kerja 2021		Rencana Kerja 2022		Rencana Kerja 2023		Rencana Kerja 2024		Rencana Kerja 2025		Rencana Kerja 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat					3 unit	Rp -	3 unit	Rp -	unit	Rp 300.000.000	unit	Rp 300.000.000	6 unit	Rp 600.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa					1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 400.000.000	1 dokumen	Rp 400.000.000	4 dokumen	Rp 1.100.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					1 laporan	Rp 250.000.000	1 laporan	Rp 250.000.000	laporan	Rp 800.000.000	laporan	Rp 800.000.000	2 laporan	Rp 2.100.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bhakti gotong royong masyarakat					1 laporan	Rp -	1 laporan	Rp -	laporan	Rp 400.000.000	laporan	Rp 400.000.000	2 laporan	Rp 800.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa					1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 200.000.000	dokumen	Rp 400.000.000	dokumen	Rp 400.000.000	2 dokumen	Rp 1.200.000.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					28 laporan	Rp 1.243.824.000	28 laporan	Rp 1.243.824.000	dokumen	Rp 1.500.000.000	dokumen	Rp 1.500.000.000	56 dokumen	Rp 5.487.848.000	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat					123 keluarga	Rp 230.817.600	123 keluarga	Rp 311.133.254	keluarga	Rp 800.000.000	keluarga	Rp 800.000.000	246 keluarga	Rp 2.141.950.854	Dinas PMD	13 Kab/Kota
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing					123 keluarga	Rp 386.527.600	123 keluarga	Rp 386.527.600	keluarga	Rp 800.000.000	keluarga	Rp 800.000.000	246 keluarga	Rp 2.373.055.200	Dinas PMD	13 Kab/Kota

Page 13

Activate Windows



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KALSEL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam pencapaian RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2021 s/d 2026. Oleh karena itu perlu adanya kesesuaian antara visi RPJMD dengan Renstra DPMD Provinsi Kalsel. Visi RPJMD Provinsi Kalsel yakni **Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan Sebagai Gerbang Ibukota Negara** yang dijabarkan dalam lima misi dimana DPMD Provinsi Kalsel ikut ambil bagian dalam pencapaian kelima misi tersebut. Relasi tersebut dijelaskan pada matriks berikut:

Tabel 7.1 Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Persentase penurunan status desa tertinggal	0%	56%	13,5%	17%	13,5%	0%	0%	100%
Persentase peningkatan status desa menjadi mandiri	0,3%	1,5%	2,1%	2,6%	3,1%	3,7%	4,2%	4,2%

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel juga memiliki capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:



Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Realisasi Capaian		Proyeksi					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	0	3%	13%	29%	41%	68%	100%	0%	0%
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	0	11%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
3	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	0	0	44	94	144	194	244	294	344	394
4	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antardesa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	0	0	44	94	144	194	244	294	344	394
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	0	197	247	297	347	397	447	497	547
6	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	0	236	286	336	386	436	486	536	586



Tabel 7.3 Target Indikator Urusan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Targ et 2021	Tar get 2022	Tar get 2023	Targ et 2024	Tar get 2025	Tar get 2026
1	Jumlah Desa Mandiri	3.944	5.444	28	38	47	57	58	59
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	7.500	9.000	552	652	752	852	952	1.052
3	Jumlah Desa Berkembang	56.791	58.291	1.415	1.234	1.134	1.034	934	834
4	Jumlah Desa Tertinggal	14.402	11.652	98	68	38	8	0	0
5	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	0	270	5	10	15	20	25	30
6	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	90	13.494	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
7	Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90	7.500	11	11	11	11	11	11
8	Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	90	7.500	11	11	11	11	11	11



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun kedepan. Setiap tahunnya juga akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan tanpa mengubah tujuan yang telah ditetapkan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



H. FARIED FAKHMANSYAH, SP, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701205 199903 1 008

